RENSTRA 2016-2021(REVISI) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

BAB I			1
PENDA	HUL	UAN	1
1.1.	Lat	ar Belakang	1
1.2.	Lar	idasan Hukum	5
1.3.	Ma	ksud dan Tujuan	6
1.4.	Sist	ematika Penulisan	6
BAB II.			7
GAMBA		UMUM KONDISI PENDIDIKAN SUMATERA BARAT	
2.1.		ndisi Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat	
2.2.		nberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	
2.3.	Kin	erja Layanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat	15
2.4.	Tar	ntangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan	
2.	4.1.	Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan	18
2.	4.2.	Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan	
2.	4.3.	Kondisi Efisiensi dan Efektifitas Tata Kelola Layanan Pendidikan	24
		Kondisi Implementasi pendidikan karakter layanan pendidikan	
ISU-ISU		ATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SUMATERA BARAT	
3.1.	Ide	ntifikasi permasalahan	
3.	1.1.	Belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan	
3.	1.2.	Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal	
3.	1.3.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal	31
3.2.		aahan visi, misi dan program Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera	
3.3.	Tel	aahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	36
3.4.	Tel 37	aahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strate	gis
3.5.	Per	ientuan Isu Isu strategis	40
3.	5.1.	Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Menciptakan Pembelajar yang berdaya saing	40
3.	5.2.	Pengembangan Lingkungan Pendidikan yang Menghargai Multi Kultural dan Kebinekaan	40
3.	5.3.	Pembentukan Karakter Madani Melalui Layanan Pendidikan	41
3.6.	Isu	Isu strategis Pendidikan Sumatera Barat	42

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD PENDIDIKAN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Pendidikan	47
BAB V	50
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI	55
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	55

Tabel 2.1-1	Kondisi Bagian dan Sub Bagian Organisasi Dinas Pendidikan Prov. Sumate	ra
	Barat	11
Tabel 2.2-1	Jumlah pengawai berdasarkan jabatan Struktural	11
Tabel 2.2-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	12
Tabel 2.3-1	Pencapaian kinerja Pelayanan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat	
	Tahun 2011-2015	15
Tabel 3.6-1	Faktor Strategis Internal Peningkatan Daya Saing Pendidikan Sumatera	
	Barat	43
Tabel 3.6-2	Faktor strategis eksternal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera	
	Barat	45
Tabel 4.1-1	Penyelarasan Tujuan, sasaran dan Indikator serta target kinerja	
	pembangunan pendidikan Sumbar	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema pembangunan Indonesia khususnya di bidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN III 2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tema pembangunan pendidikan selama rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 terdiri dari empat tema yakni periode 2005-2009 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan. Periode 2010-2014 temanya adalah penguatan pelayanan pendidikan, sedangkan tema pembangunan pendidikan saat ini yakni periode 2015-2019 adalah menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional dan tema pembangunan pendidikan pada periode 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. (lihat Renstra Dikbud RI 2015-2019).

Pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan ini diarahkan oleh cara pandang (paradigma) agar sasaran yang dirumuskan dapat dicapai. Diantara paradigma pembangunan pendidikan nasional itu adalah: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

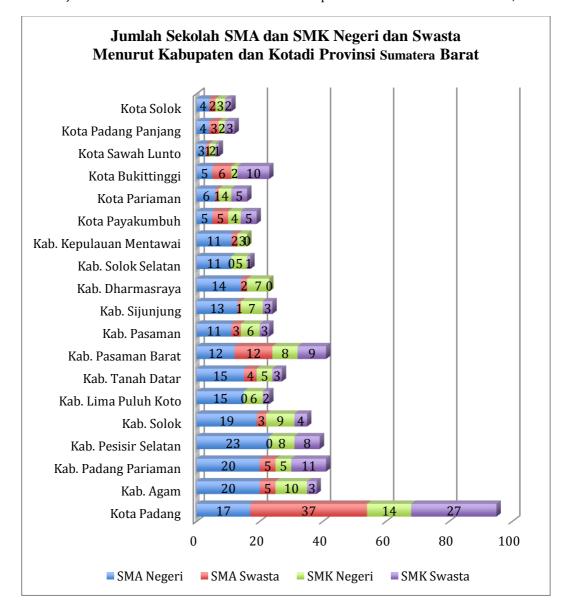
Pendidikan untuk semua dimana pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Sedangkan pendidikan sebagai suatu gerakan adalah penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Pendidikan menghasilkan pembelajar adalah Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

Berikutnya pendidikan membentuk karakter adalah pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Selanjutnya sekolah yang menyenangkan adalah sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Semua paradigma pembangunan pendidikan ini tentunya harus menjadi koridor dalam pembangunan pendidikan ke depannya.

Kemampuan pemerintah provinsi Sumatra Barat dalam mengembangkan aksessibilitas pendidikan menengah atas tentunya tidak terlepas dari potensi jumlah sekolah yang dimiliki baik sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Jumlah

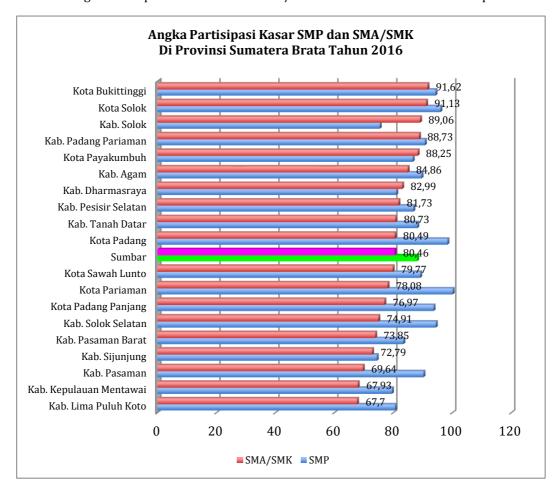
sekolah menengah atas total adalah sebanyak 530 sekolah yang terdiri dari 320 (60,38%) SMA dan sebanyak 210 (39,62%) SMK. Dari jumlah SMA itu ternyata sebanyak 228 (71,25%) adalah SMA Negeri dan sebanyak 92(28,75%) adalah SMA swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan pendidikan SMA itu didominasi oleh SMA negeri, peran sekolah swasta pada jenis SMA ini masih relative kecil. Untuk lebih detilnya lihat diagram di bawah ini.

Gambar 1.1-1 Jumlah Sekolah SMA dan SMK Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Tahun 2017



Jumlah lembaga pendidikan SMK adalah sebanyak 210 unit yang terdiri dari 110 (52,38%) SMK negeri dan sebanyak 100 (47,62%) adalah SMK Swasta, data ini menunjukkan potensi sekolah menengah kejuruan ini cukup berimbang potensinya di provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari segi lokasi, maka letak sekolah yang paling banyak itu terdapat di Kota Padang sebanyak 95 (17,92%), disusul oleh kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman Barat yang jumlahnya sama yakni sebanyak 41(7,74%). Sedangkan wilayah kabupaten dan kota yang paling sedikit memiliki jumlah sekolah adalah Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padangpanjang.

Apabila dikaitkan dengan angka partisipasi kasar (APK) SMA dan SMK ini , maka dua wilayah Kota yakni Kota Sawahlunto dan Kota Padangpanjang ternyata memiliki angka APK berada di bawah rata-rata Sumatera Barat masing-masing secara berturut turut adalah 79.77 dan 76.97 jauh berada di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80.46. untuk lebih detilnya lihat diagram di bawah.



Gambar 1.1-2 Angka Partisipasi Kasar SMP dan SMA/SMK Prov. Sumbar Menurut Kabupaten dan Kota

Diagram 1.1-2 di atas juga memperlihatkan bahwa angka APK SMA/SMK yang tertinggi itu diraih oleh Kota Bukittinggi yang mencapai 91.62 dan Kota Solok yang mencapai 91.13. sehingga terdapat empat wilayah Kota yang telah memiliki angka APK yang berada di atas rata-rata Sumatera Barat yakni disamping Kota Bukittinggi, Kota solok, juga Kota Payakumbuh dan Kota Padang, sedangkan tiga Kota lainnya yakni Kota Sawahlunto, Kota Pariman dan Kota Padangpanjang berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, terdapat 6 wilayah wilayah kabupaten yang sudah memiliki angka APK SMA/SMK diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Sedangkan terdapat 6 kabupaten yang memiliki angka APK SMA/SMK yang berada di bawah rata-rata APK Sumatera Barat yakni kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Mentawai dan 50 Kota.

Angka partisipasi kasar (APK) ini menunjukkan tingginya tingkat partispasi sekolah tanpa mepertimbangkan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika angka APK mencapai 100, Ukuran APK ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep APK ini, maka belum ada kabupaten dan Kota

mencapai APK SMA/SMK 100. Hal ini berimplikasi bahwa masih ada penduduk usia sekolah SMA/SMK yang belum duduk dibangku pendidikan SMA/SMK dan gejala ini dominan pada tiga kabupaten yakni, Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan kabupaten 50 Kota.



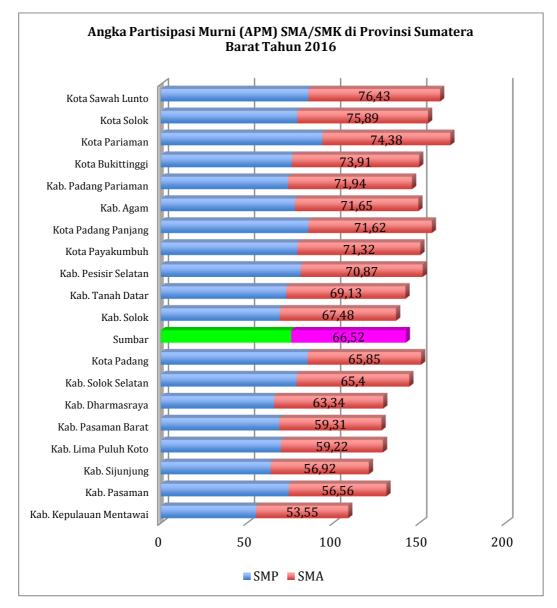


Diagram 1.1-3 diatas memperlihatkan angka partisipasi murni (APM) yang mengambarkan persentase penduduk usia SMA/SMK yakni 16-18 tahun yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada. Belum adanya kabupaten dan kota yang mencapai angka APM 100 berarti ada indikasi bahwa masih ada penduduk yang berusia SMA yakni 16-18 tahun yang belum berada dilevel pendidikan ini. APM yang tertinggi dicapai oleh Kota Sawahlunto yakni 76.43 dan Kota Solok mencapai 75,89. Artinya sebanyak 76.43 % penduduk usia SMA 16-18 tahun yang berada di sekolah menikmati bangku pendidikan, sisanya sebanyak 23.57% masih belum masuk sekolah SMA/SMK. Hal ini dapat disebabkan oleh karena keterbatasan akses terhadap pendidikan SMA/SMK juga disebabkan karena keterbatasan tempat yang tersedia atau daya tampung yang belum mencukupi, ini tentu perlu didalami lebih lanjut oleh pihak yang berwewenang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana strategi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara dengan pengaturan kepentingan pembangunan pendidikan. Dasar hukum pembangunan pendidikan yang diacu tersebut adalah:

- 1. Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. UU No: 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
- 3. UU no: 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- 4. UU no: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas)
- 5. UU no: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- 6. PP no: 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
- 7. PP no: 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
- 8. PP no: 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- 9. PP no: 047 tahun 2008 tentang wajib belajar
- 10. PP no: 048 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
- 11. PP no: 074 tahun 2008 tentang guru
- 12. PP no: 23/ tahun 2013 tentang perubahan PP no: 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
- 13. PP no: 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara dan penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- 14. Permendikbud no: 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
- 15. Permendikbud No: 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasional dan non operasional SD/MI/SMP/SMA/SMK
- 16. Permendikbud no: 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah
- 17. Permendikbud no: 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah
- 18. Permendikbud no: 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah
- 19. Permendikbud no: 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah
- 20. Permendikbud no: 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
- 21. Permendagri no: 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- 22. Peraturan daerah no: 7 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2021
- 23. Peraturan daerah no: 13 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi Sumatera Barat

- 24. Peraturan daerah no: 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
- 25. Peraturan Gubernur no: 78 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) pendidikan provinsi Sumatera Barat dimaksudkan agar Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat memiliki arah pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat
- 2. Menentukan arah kebijakan, strategi dan indikasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2019 sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2016-2019.
- 3. Menyusun indicator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra kementrian pendidikan dan kebudayaan RI tahun 2015-2019 dan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakans ebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab 2 Gambaran pelayanan organisasi perangkat daerah Pendidikan provinsi Sumatera Barat berisi tugas fungsi dan struktur organisasi OPD Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, sumberdaya OPD Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
- Bab 3 Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayann Dinas Pendidikan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L, Telaah rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.
- Bab 4 Tujuan dan sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat,
- Bab 5 Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat, berisi telaahan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat
- Bab 6 Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan, berisi program dan kegiatan serta rencana pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan

Bab 7 Penutup, berisi kesimpulan dan implikasi kebijakan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

Pada bab II ini rencana strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat dikemukakan kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini agar diperoleh gambaran secara umum berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembangunan di bidang pendidikan di Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.

2.1. Kondisi Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat

Kondisi pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan (SK Gubernur No:78/Tahun 2016). Fungsi Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- 3. Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, lingkup provinsi dan kabupaten/Kota
- 4. Melaksanakan kesekretariatan dan perencanaan Dinas
- 5. Melakukan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB).
- 6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
- 7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsinya.

Kepala dinas pendidikan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Tugas kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 2. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang pendidikan;
- 3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 4. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas dan merumuskan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
- 5. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pendidikan;
- 6. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Bagian Perencanaan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
- 7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dinas

serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi Kesekretariatan, Bagian Perencanaan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;

- 9. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pendidikan;
- 10. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- 11. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 12. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi ini kemudian organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di susun sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang ada agar organisasi dan kelembagaan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di komandoi oleh Kepada Dinas beserta Sekretaris Dinas yang dibantu oleh 4 (empat) bagian, satu cabang dinas, yakni:

- 1. Bagian Perencanaan,
- 2. Bagian Pembinaan Sekolah Menengah Atas (Sma),
- 3. Bagian Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk),
- 4. Bagian Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Slb),
- 5. Cabang Dinas,
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd), Dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yakni sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan sub bagian kepegawaian. Bagian secretariat memiliki 11 tugas pokok diantaranya melakukan pengelolaan urusaan rumahtangga dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokoleran, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keamanan, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok ini sekretaris Dinas mememiliki sejumlah fungsi yang dapat dilihat secara detil pada SK Gubernur No. 78/2016 tentang tugas pokok dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat 13 tugas pokok untuk sub bagian umum dan perlengkapan, 100 tugas pokok untuk sub bagian keuangan dan 10 tugas pokok untuk sub bagian kepegawaian. Sehingga bagian secretariat memiliki 44 total tugas pokok.

Bagian perencanaan terdiri dari 3 sub bagian yakni: sub bagian penyusunan rencana dan program, sub bagian data dan statistic pendidikan, dan sub bagian supervise, monitoring evaluasi dan laporan. Tugas pokok bagian perencanaan ini adalah menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan data pendidikan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian tugas pokok dan fungsi bagian perencanaan terdiri dari 14 tugas pokok ditambah dengan 8 tugas pokok untuk sub bagian penyusunan rencana, 14 tugas pokok untuk sub bagian data dan statistic dan 12 tugas pokok untuk sub bagian monitoring evaluasi dan laporan. Sehingga bagian perencanaan ini memiliki total tugas pokok adalah sebanyak 48 tugas pokok.

Adapun Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana dan pengkajian program kerja Kesekretariatan;
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
- 3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
- 4. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengkajian anggaran belanja serta pengendalian administrasi belanja;
- 5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penata usahaan kelembagaan;
- 6. Mengkoordinir perencanaan pemanfaatan, penatalaksanaan dan pertanggung jawaban barang inventaris milik daerah;
- 7. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- 8. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan serta telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9. Menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- 10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pembinaan sekolah menengah atas (SMA) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 8 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok, sehingga bagian pembinaan SMA ini memiliki 46 total tugas pokok.

Bagian pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 14 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdir dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok. Sehingga bagian pembinaan SMK ini memiliki 46 total tugas pokok.

Adapun tugas pokok pendidikan menengah adalah melaksanakan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan diibidang kurikulum dan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya ini, bidang pendidikan menengah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan Dan Pelaksanaan Dibidang Kurikulum Dan Kesiswaan
- 2. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan Dan Pelaksanaan Dibidang Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
- 3. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan Dan Pelaksanaan Dibidang Sarana Dan Prasarana
- 4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas dan fungsinya.

Bagian pembinaan sekolah luar biasa (SLB) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 14 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdir dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok. Sehingga bagian pembinaan SLB ini memiliki 46 total tugas pokok.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan sekolah luar biasa dan berkebutuhan khusus. Untuk melaksanan tugas pokoknya ini, maka bagian pembinaan sekolah luar biaya dan pendidikan berkebutuhan khusus ini berfungsi sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan
- 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan
- 3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana
- 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit pelaksana teknis memiliki tugas pokok adalah melaksanakan sebahagian tugas teknis dan operasional dinas pendidikan provinsi Sumatera barat sesuai dengan bidangnya, dengan wilayah kerja kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari 4 bagian yakni: secretariat, perencanaan, pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan SLB, dan ditambah dengan dua urusan yakni UPTD dan kelompok fungsional, sehingga keseluruhan terdapat 242 tugas pokok di bidang pelayanan pendidikan di provinsi Sumatera Barat.

Apabila dikaitkan dengan tema pembangunan pendidikan nasional tahun 2014-2019 yang menjiapkan manusia Indonesia yang berdaya saing regional, kemudian dituangkan dalam visi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat; Terwujudnya sumberdaya manusia sumatera barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan mutu, relevansi dan saya saing pendidikan, maka perlu dipertimbangkan bagian dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan yang mengurusi peningkatan mutu pendidikan dan kerjasama. Hal ini tentunya sesuai pula dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Upaya pemenuhan standar pendidikan nasional ini bagi pengelola SMA dan SMK tentunya menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, Dinas pendidikan sebagai Pembina SMA dan SMK serta SLB tentunya perlu mengarahkan pembinaannya kepada pencapaian standar pendidikan nasional ini terutama mulai dari standar isi, standar proses, standar sarana dan parsarana pendidikan, bahkan sampai kepada standar pengelolaan pendidikan.

Hal ini tentunya tidak dapat diberikan tugas dan tanggungjawab ini kepada lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) saja. Proses menuju kepada perolehan mutu pendidikan yang berstandar nasional tentunya bermulai dari tata kelola sekolah itu sendiri. Kelembagaan LPMP lebih kepada upaya memperoleh sertifikasi sekolah karena telah menjalankan standar nasional pendidikan agar memiliki mutu nasional.

Tabel 2.1-1 Kondisi Bagian dan Sub Bagian Organisasi Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat

Organ/Bagian	Bagian/sub bagian	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Pokok	Fungsi	Jumlah Personal
Kepala Dinas	8	12	-	1
Sekretariat	3	44	4	
Perencanaan	3	48	4	
Pembinaan SMA	3	46	4	
Pembinaan SMK	3	46	4	
Pembinaan SLB	3	46	4	
UPTD	-	-		
Kelompok	_	_		
Fungsional				
Cabang dinas	-	-		
Total	-	242	-	

Berdasarkan kepada table 2.1.1. terlihat bahwa tugas pokok dan rincian Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat seluruhnya adalah 242 butir dengan 8 bidang, diantara bidang yang paling banyak tugas pokoknya adalah bidang perencanaan. Sedangkan bidang pembinaan SMA, SMK dan SLB semua sama memiliki sebanyak 46 tugas pokok, yang terdiri dari 3 seksi yakni seksi kurikulum dan kesiswaan, seksi tenaga teknis dan seksi sarana dan prasarana sekolah. Sehingga terasa penting ditambahkan seksi peningkatan mutu dan kerjasama, agar pembinaan sekolah- sekolah yang ada diarahkan kepada peningkatan daya saing regional. Hal ini sejalan dengan misi yang ketiga dalam pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat yakni peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

2.2. Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari sumberdaya manusia, tenaga honorer, aset/modal dan unit usaha yang berjalan. Pada saat ini jumlah pegawai dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 281 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak satu orang, eselon III sebanyak 7 orang dan eselon IV terdiri dari 21 orang dan staf sebanyak 256 orang. Untuk lebih rinci dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2-1 Jumlah pengawai berdasarkan jabatan Struktural

No	SKPD dan UPT	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	1	5	17	197	216
2.	UPT BalteKomdik		1	3	11	15
3.	UPT BLPT		1	1	28	30
4.	Pengawas Sekolah				20	20
	Jumlah	1	7	21	256	281

Perubahan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan telah dipisahkan dengan urusan kebudayaan yang telah menjadi dinas berdiri sendiri, sehingga telah merampingkan struktur organisasi sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016 dan perda nomor 8 tahun 2016 dinas pendidikan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan Dinas kebudayaan setelah terpisah dari dari pendidikan menanggani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan tipe dinasnya B.

Jumlah pegawai berdasarkan kepada latar belakang pendidikan yang ditamatkan terlihat belum memadai, karena yang berpendidikan perguruan tinggi sangat kecil persentasenya

Tabel 2.2-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1 s/d D4	SMA	SMP	SD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	0	41	89	7	78	0	1	216
2.	UPT Baltekomdik	0	6	5	0	4	0	0	15
3.	UPT BLPT	0	2	2	7	19	0	0	30
4.	Pengawas Sekolah	0	10	10	0	0	0	0	20
	Jumlah	0	59	106	14	91	0	1	301

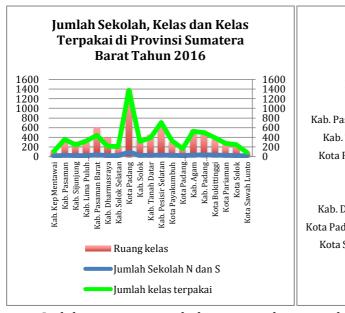
Berdasarkan kepada tabel 2.2.2 di atas terlihat bahwa potensi sumberdaya manusia dinas pendidikan Sumatera Barat sudah memadai dari segi kualitas pendidikan karena sebagian mereka berasal dari guru senior yang telah ditugas karyakan ke dinas pendidikan karena memiliki kinerja dan reputasi akademik yang baik. Sehingga dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada, telah memungkinkan dinas pendidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Selanjutnya aset dan modal yang dimiliki dan dikuasai oleh dinas pendidikan Sumatera Barat adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), jumlah guru dan tenaga kependidikan dari semua sekolah menengah di Sumatera Barat. Hal ini merupakan aset dan modal dalam membangun mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Pada gambar 2.2.1 di bawah menjelaskan bahwa jumlah sekolah dan jumlah local yang tersedia pada setiap kabupaten dan kota sudah mencukupi kebutuhan daya tampung siswa baru, karena jumlah ruang kelas dan kelas yang terpakai sudah sama, kecuali di kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya jumlah kelas terpakai masih jauh lebih rendah dari jumlah kelas yang ada. Ketersediaan sekolah dengan jumlah kelasnya ini paling tinggi terdapat di Kota yakni Kota Padang yang mencapai jumlah sekolah sebanyak 90 negeri dan swasta dengan jumlah kelas total adalah sebanyak 1.377 lokal dan local yang terpakai 1.379 lokal dengan asumsi jumlah murid satu local 30 orang. Hal ini berarti sekolah di Kota Padang jumlah siswa per local melebihi 30 orang.

Berikutnya di kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah sekolah sebanyak 27 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pasaman Barat yang mencapai 35 buah dan Padang Pariaman sebanyak 33 buah sekolah, tetapi dua kabupaten terakhirnya kalah jumlah kelasnya dibandingkan dengan kabupaten Pesisir selatan yang mencapai 622 ruang kelas, sementara kabupaten Pasaman Barat sebesar 610 kelas dan kabupaten Padang Pariaman sebanyak 540 ruang kelas. Hal ini berarti daya tampung fisik sekolah di kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi di bandingkan dengan 2 kabupaten lainnya yang merupakan daerah yang memiliki ruang kelas terpakai paling tinggi di Sumatera Barat.

Gambar 2.2-1 Jumlah Sekolah dan Lokal Tersedia Menurut Kabupaten dan kota Di Provinsi Sumatera Barat



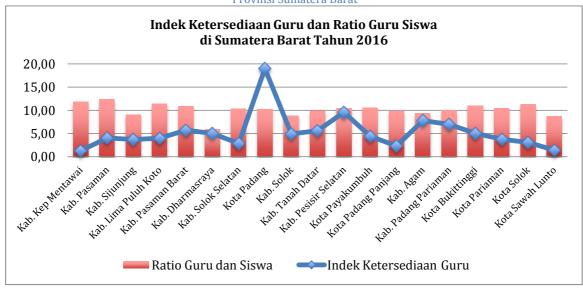


Indek penggunaan kelas optimal itu terdapat di Kota Padang sebesar 19,26 disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 9,84 dan Kabupaten Agam sebesar 7,26, sedangkan kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,12. Angka indek penggunaan kelas yang paling rendah terdapat pada Kota Sawahlunto sebesar 1,21.

Gambar 2.2.2. di bawah memberikan informasi bahwa ratio guru dengan siswa sudah memperlihatkan ratio ideal, ratio paling tinggi itu terdapat pada kabupaten Pasaman dan Kepulauan Mentawai, namun indek ketersediaan gurunya masih rendah. Apabila dikaitkan dengan tingkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) ternyata kedua kabupaten ini juga paling rendah diantara yang lainnya.

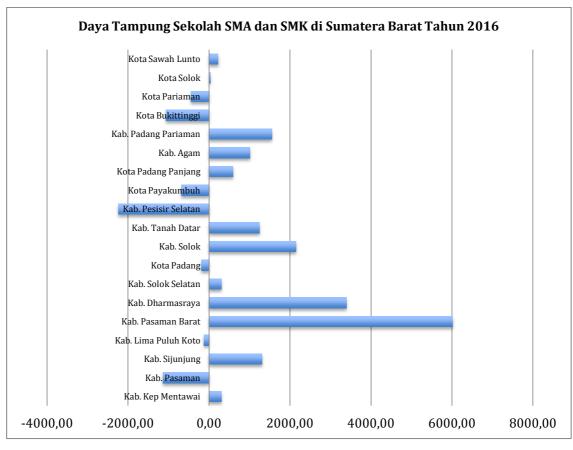
Ratio guru dan siswa paling rendah terdapat pada kabupaten Dharmasrya dan kabupaten Sijunjung, walaupun ketersediaan gurunya sudah menyamai ratio gurusiswanya, sehingga daya tampungnya sudah lebih besar dari kapasitas sekolah yang ada, dan angka partisipasi kasarnya untuk kabupaten dharmasraya sebesar 81,73 sudah di atas rata-rata APK provinsi Sumatera barat sebesar 80.46.

Gambar 2.2-2 Grafik Perbandingan Ratio Guru dan Siswa SMA/SMK dan Indek Ketersediaan Guru SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat



Disamping itu, indek ketersediaan guru paling tinggi itu terdapat pada Kota Padang yang mencapai 18.98 dan paling rendah di kabupaten Kepulauan Mentawai yang mencapai 1,24 dan Kota Sawahlunto mencapai 1,40. Semakin rendahnya angka indek tentunya kemampuan daya tampung sekolah untuk menerima murid baru semakin rendah pula, itulah sebabnya kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto tingkat APK SMA/SMKnya sebesar 79,77 masih di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat. Artinya factor rendahnya angka partisipasi kasar juga disebabkan oleh ketersediaan guru yang belum mencukupi di wilayah ini, disamping daya tampung yang memperlihatkan tingkat ketersediaan local yang masih rendah.

Gambar 2.2.3. di bawah memperlihatkan tingkat daya tampung sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat tahun 2016 yang dihitung dari jumlah local yang tersedia, jumlah local yang terpakai dan jumlah sekolah yang ada pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terdapat 7 kabupaten dan Kota yang masih mengalami kekurangan daya tampungnya yakni 4 kota terdiri dari Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Sedangkan terdapat 3 kabupaten yakni kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan 50 Kota.



Gambar 2.2-3 Gambaran Tingkat Daya Tampung SMA dan SMK di Sumatera Barat Tahun 2016

Pada wilayah kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kekurangan daya tampung yang paling tinggi bersama kota Bukittinggi, ternyata ini masalah tingginya jumlah siswa yang masuk ke sekolah karena kedua wilayah ini angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partispasi murni (APM)nya sudah jauh di atas rata-rata APK dan APM SMA dan SMK provinsi Sumatera Barat. Sementara indek ketersediaan gurunya masih rendah. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa apabila daya tampungnya masih rendah sedangkan angka partisipasi kasar dan murninya sudah di atas rata- rata provinsi Sumatera Barat, maka wilayah ini mengalami masalah kekurangan guru. Sebaliknya

apabila daya tampungnya sudah melebih jumlah kelas yang tersedia, sedangkan angka APK dan APMnya sudah di atas rata-rata Sumatera Barat, maka ini masalahnya terletak pada kekurangan sarana fisik sekolah seperti local yang tersedia tidak sebandingnya dengan tingginya potensi usia sekolah yang akan bersekolah di SMA dan SMK.

2.3. Kinerja Layanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat

Kinerja layanan Dinas pendidikan mengacu kepada tatakelola sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah khusus (SMK) dan sekolah luar biasa yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari ruangan belajar, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio dan semua para sarana yang mendukung kepada penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang menyenangkan, seperti lingkungan fisik sekolah yang sejuk, nyaman, asri bahkan lingkungan social sekolah yang mendukung kepada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran, empati, rasa solidaritas dan sikap menujung tinggi kebinekaan, sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Disamping itu, kinerja dinas pendidikan juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan selama periode 2011-2015.

Tabel 2.3-1 Pencapaian kinerja Pelayanan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target IKK	R		FARGET SKPD T		e-	REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-					
	Fungsi SKPD	org	*****	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Α	PENDIDIKAN FORMAL																	
1	SD																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	95	98%	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.10	98.38	98.81	98.99	99.18	104.36	103.56	102.93	102.05	101.20
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,4%	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	92%	90.12	90.29	91.12	91.75	92.00	73.50	75.60	77.46	85.00	88.60	81.56	83.73	85.01	92.64	96.30
	(d) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	91.65	92.75	94.16	96.89	98.00	86.50	86.90	87.06	87.10	87.17	94.38	93.69	92.46	89.90	88.95
	(e) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.11	92.79	93.17	94.25	95.00	31.59	31.80	-	-	-	34.67	34.27	0.00	0.00	0.00
	(f) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	95	100%	96.51	97.89	98.11	99.14	100.00	95.60	96.10	96.91	98.16	98.92	99.06	98.17	98.78	99.01	98.92
	(g) Jml Siswa per Kls	30-40	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(h) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	90.50	91.00	91.25	93.50	98.90	98.37	97.85	97.07	98.42
	(i) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMP	95	99%	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	101.05	100.57
2	SMP																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.64	90.79	92.22	99.27	99.28	98.51	98.68	99.16	105.61	104.51
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0.4%	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	88.00	88.76	88.88	88.92	90.40	96.70	96.48	95.57	94.60	95.16
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90%	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(e) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	93.00	95.00	96.00	97.00	98.00	93.00	95.00	96.00	97.00	81.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.65
	(f) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	86.63	90.50	-	-	-	95.20	98.37	0.00	0.00	0.00
	(g) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75
	(h) Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target SPM %/	Target IKK	R		TARGET SKPD T		e-			EALISA an Tal	ASI nun ke-			Capaian	RASIO pada T	ahun ke)-
	Fungsi SKPD	org		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMA	70	99%	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	101.28	96.53
_																		
3	SMA (a) Partisipasi Anak																	
	Bersekolah	90	92%	90.25	90.50	91.10	91.60	92.00	68.12	71.38	74.07	81.97	82.05	75.48	78.87	81.31	89.49	89.18
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,6 %	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	131.43	1.58
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	37.30	100.00	100.00	100.00	100.00	39.26
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(e) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(f) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	98 %	92.00	94.00	95.00	97.00	98.00	92.61	92.61	-	-	-	100.66	98.52	0.00	0.00	0.00
	(g) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(h) Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	0.95	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	25	27 %	22.00	25.00	30.00	31.00	35.00	25.52	25.97	26.05	37.00	41.32	116.00	103.88	86.83	119.35	118.06
4	SMK		0.604	0.00	0.00	0.50	0.65	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	06.65	440.00	40544		050000
	(a) Angka Putus Sekolah (b) Jml Sklh Memiliki	<1	0.6 %	0.90	0.80	0.70	0.65	0.01	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	110.00	127.14	141.54	9500.00
	Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	62.00	63.00	63.50	64.00	65.00	68.13	68.48	68.28	68.09	68.42
	(c) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	80.00	81.50	82.00	82.40	83.00	97.56	97.02	95.35	93.64	92.22
	(d) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.00	90.00	90.60	91.00	93.60	97.80	97.83	97.42	96.81	98.53
	(e) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.95	92.95	-	-	-	101.04	101.03	0.00	0.00	0.00
	(f) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(g) Jml Siswa per Kls	30-40	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(h) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	20	20 %	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Lulusan yg diterima di Dunia Kerja sesuai Keahlian	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
В	PENDIDIKAN NON FORMAL																	
1	Pendidikan Kesetaraan																	
	(a) Bisa membaca dan menulis	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70
	(b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15- 44 Th.	<7	4 %	5.00	4.80	4.60	4.40	4.00	1.50	1.78	0.83	0.65	0.41	30.00	37.08	18.04	14.77	10.25
	© Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 Th.	<30	15 %	20.00	19.00	18.00	16.00	15.00	9.43	7.97	7.89	7.56	7.32	47.15	41.95	43.83	47.25	48.80
2	Program Paket A																	
	(a) Pesrta Paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	85	90 %	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	82.00	83.60	84.70	85.50	86.00	95.35	96.09	96.25	96.07	95.56
	(b) Peserta didik Paket A yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	5.70	4.50	77.78	100.00	100.00	95.00	90.00
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	96.00	97.30	98.20	93.00	94.67	100.79	101.34	101.35	95.53	96.60
	(d) Jml peserta paket A yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	84.60	86.00	86.70	87.90	89.55	88.82	89.57	89.48	90.29	91.38
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket A yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target SPM %/	Target IKK	R		TARGET SKPD T		e-			EALIS <i>i</i> an Tal	ASI nun ke			Capaian	RASIO pada T	ahun ke	}-
	Fungsi SKPD	org		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	98.90	98.91	98.92	99.47	99.68
3	Paket B																	
	(a) Pesrta Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	90	92 %	90.25	90.82	91.04	91.70	92.00	83.50	83.60	84.75	85.95	86.88	92.52	92.05	93.09	93.73	94.43
	(b) Peserta didik Paket B yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	6.50	6.70	5.60	4.00	77.78	81.25	95.71	93.33	80.00
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	85.20	87.30	88.20	83.00	84.67	103.90	103.93	102.56	94.32	94.08
	(d) Jml peserta paket B yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	50	60 %	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	50.00	52.60	53.80	54.00	58.75	96.15	97.41	96.07	93.10	97.92
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket B yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	103.89	105.22
4	Program Paket C																	
	(a) Pesrta Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	70	75 %	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	70.00	72.30	73.50	73.60	74.89	98.59	100.42	100.68	99.46	99.85
	(b) Peserta didik Paket C yg tdk aktif	<5	3 %	4.70	4.20	3.90	3.30	3.00	4.00	4.10	3.60	3.15	2.95	85.11	97.62	92.31	95.45	98.33
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	85 %	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	80.20	81.60	82.00	82.50	80.37	99.01	99.51	98.80	98.21	94.55
	(d) Jml peserta paket C yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	10	15	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	7.50	8.76	9.00	8.80	10.50	68.18	73.00	69.23	62.86	70.00
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket C yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	103.89	105.22
5	Pendidikan Taman Kanak-Kanak																	
	(a) Jml anak usia 4-6 yg mengikuti program TK	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(b) Guru yg layak mendidik TK sesuai dg standar kompetensi Nasional	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	© TK yg memiliki sarpras bermain	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(d) TK yg telah menerapkan manajemen berbasis sekolah	60	70 %	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Indikator Kinrja Kunji (Permendagri 73 Th 2009)																	
1	Angka Rata-rata lama bersekolah	7.4	8.40	9.35	9.70	10.05	8.78	8.88	8.57	8.60	8.63	8.71	8.91	91.66	88.66	85.87	99.20	100.34
2	Angka melek huruf	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92
3	Pembinaan guru jenjang SD	35%	40.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	35.00	36.00	37.50	38.00	39.00	97.22	97.30	98.68	97.44	97.50
4	Pembinaan guru jenjang SMP	46%	50.00	47.00	48.00	49.00	49.50	50.00	46.00	46.70	47.00	48.76	49.67	97.87	97.29	95.92	98.51	99.34
5	Pembinaan guru jenjang SMA/SMK	37%	40.00	37.98	38.25	38.89	39.25	40.00	35.00	36.20	37.60	38.90	39.58	92.15	94.64	96.68	99.11	98.95
6	APM SD/MI/Paket A	95%	98.00	99.67	99.75	100.00	100.00	100.00	94.46	94.49	94.48	99.56	99.57	94.77	94.73	94.48	99.56	99.57
7	APM SMP/MTs/Paket B	79%	80.00	78.80	80.35	82.90	83.45	85.00	75.43	80.90	80.95	81.12	81.15	95.72	100.68	97.65	97.21	95.47
8	APM SMA/SMK/MA/Paket C	72%	73.00	62.50	67.50	72.50	75.00	80.00	50.34	69.67	69.88	73.08	73.10	80.54	103.21	96.39	97.44	91.38
9	Angka Putus sekolah SD	<1	0.40	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
10	Angka Putus sekolah SMP	<1	0.40	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00

NO	Indikator Kinerja NO sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	SPM %/	Target IKK	R		TARGET SKPD T	_	e-			EALISA an Tal	ASI nun ke-	-		Capaiar	RASIO pada T		e-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
11	Angka Putus sekolah SMA/SMK	<1	0.60	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	131.43	1.58					
12	Angka kelulusan SD	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	99.53	96.72	97.99	97.99	96.07	104.49	100.74	101.14	100.66	97.04					
13	Angka kelulusan SMP	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	95.16	97.56	99.02	99.95	99.84	99.91	101.61	102.20	102.67	100.85					
14	Angka kelulusan SMA/SMK	97%	98.00	97.21	97.32	97.49	97.78	98.00	95.25	99.40	85.39	99.60	99.95	97.98	102.14	87.59	101.86	101.99					
15	Angka Melalnjutkan dari SD ka SMP	95%	99.00	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	101.05	100.57					
16	Angka Melalnjutkan dari SMP ka SMA/SMK	70%	99.00	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	101.28	96.53					
17	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	92%	95.00	92.50	93.00	93.50	94.00	95.00	83.12	87.37	86.88	87.35	91.01	89.86	93.95	92.92	92.93	95.80					

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan

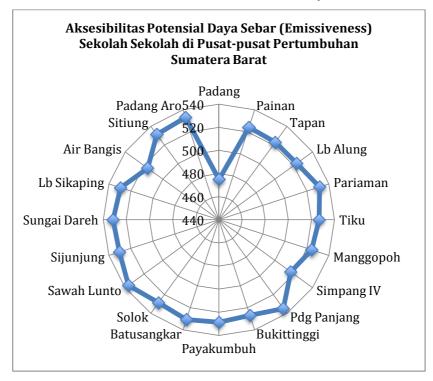
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan provinsi sumatera Barat dapat dikemukakan berdasarkan pilar penyelenggaraan pendidikan yagn telah dicanangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan selama ini. Yakni pilar peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, tantangan dan peluang terhadap kondisi guru dan tenaga kependidikan. Tantangan terhadap kondisi efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, tantangan dan peluang penyelneggaraan pendidikan berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan Sumatera Barat.

2.4.1. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan

Kondisi akses dan pemerataan layanan pendidikan berkaitan dengan keterjangkauan pendidikan SMA dan SMK oleh penduduk usia sekolah, termasuk juga oleh rumahtangga penduduk yang miskin. Dengan demikian aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas pendidikan dengan pemerataan kesempatan memasuki sekolah/non diskriminasi, aksesibilitas fisik (kemudahan jangkauan secara geografis), aksesibilitas ekonomi, karakteristik system pelayanan, dan pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam kehidupan masyarakat.Pada bagian ini akan ditemukan permasalahan yang dihadapi Sumatera barat selama ini, dengan menganalisis data-data yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik, ekonomi dan seterusnya itu.

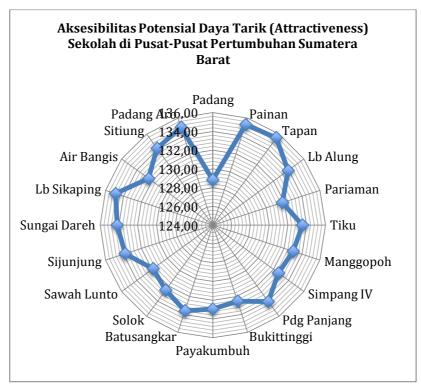
Aksesibilitas potensial merupakan teknik analisis yang menggunakan jarak lokasi antar pusat pertumbuhan dalam satu wilayah dengan kegiatan atau pelayanan. Analisis ini dikembangkan untuk mempertimbangkan kemampuan aktifitas suatu wilayah dalam hal ini fungsi pelayanan pendidikan yakni sekolah terhadap kebutuhan pendidikan bagi penduduk usia sekolah; dalam hal ini adalah penduduk usia sekolah SMA/SMK di pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat, yang diindeks dengan jarak lokasi dari fungsi pelayanan itu dibangun. Semakin besar nilai matrik Aksesibilitas potensial (A(P), semakin sulit akses. Sebaliknya semakin rendah nilai matrik A(P) makin mudah akses. Nilai matrik aksesibilitas potensial mengambarkan kemampuan daya tarik fungsi pelayanan terhadap daerah sekitarnya sehubungan jarak lokasi dan kemampuan daya sebar fungsi pelayanan teradap daerah *hinterland*nya.

Gambar 2.4.1-1 Kondisi Aksesibilitas Potensial Sekolah –Sekolah di Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sumbar

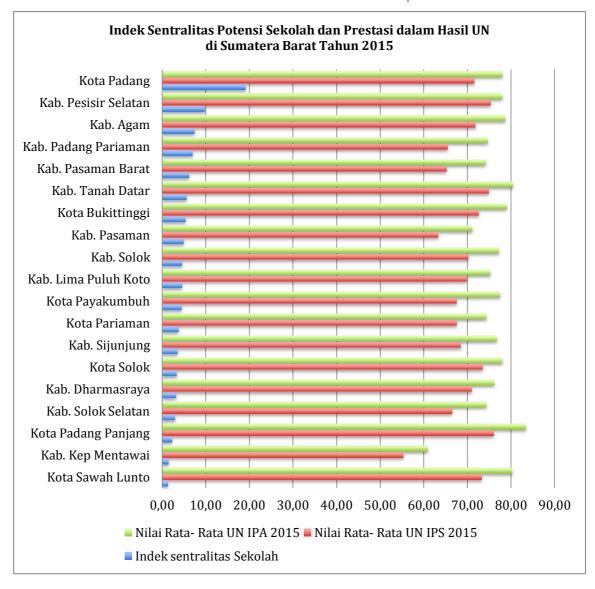


Pada gambar 2.4.1.1. dan 2.4.1.2. memberikan informasi bahwa sekolah-sekolah di Kota Padang memiliki daya sebar dan daya tarik yang lebih baik karena mampu menarik daerah-daerah hinterlandnya untuk dapat menikmati fungsi pelayanan sekolah-sekolah yang ada. Sedangkan sekolah-sekolah yang ada di pusat pertumbuhan Sawahlunto, Padangpanjang, dan Padang Aro memiliki daya sebar pelayanan sekolah yang rendah, karena hanya melayani daerah sekitarnya saja.

Gambar 2.4.1-2 Kondisi aksesibilitas potensial daya tarik sekolah-sekolah pada pusat pertumbuhan wilayah Sumbar



Gambar 2.4.1.3. memperlihatkan bahwa indeksentralitas fungsi pelayanan pendidikan yang memberikan informasi tentang kondisi aksesibilitas karakteristik system pelayanan sekolah dalam pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Indek yang paling tinggi mengambarkan semakin lengkapnya fungsi pelayanan sekolah yang dapat diakses oleh penduduk, diantara fungsi pelayanan itu adalah jumlah sekolah, jumlah local, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah laboran, jumlah pustakawan, jumlah pengawas dan tenaga administrasi sekolah.



Gambar 2.4.1-3 Indek Sentralitas Potensi sekolah dan Hasil Capaian UN Tahun 2015

Berdasarkan kepada kompleksitas fungsi pelayanan pendidikan, yang mencerminkan akasesibilitas, maka Kota padang memiliki indek fungsi pelayanan sekolah yang paling tinggi sebesar 19.10, disusul oleh kabupaten Pesisir Selatan dengan indek sebear 9,73 dan kabupaten Agam sebesar 7.40. indek sentralitas fungsi pelayanan pendidikan yang paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.26, kabupaten Keplulauan Mentawai sebesar 1.43 dan Kota Padangpanjang sebesar 2.22.

Apabila di sandingkan dengan prestasi dalam perolehan nilai unjian nasional dengan asumsi semakin lengkap fungsi pelayanan tentunya kualitas juga semakin lebih baik, tetapi ternyata belum terbukti, rangking nilai UN IPS yang paling tinggi itu diraih

oleh sekolah SMA/SMK Kota Padangpanjang dengan nilai rata-rata sebesar 76.01 dan nilai UN IPA nya sebesar 83.34. demikian juga untuk ota Sawahlunto perolehan nilai rata-rata UNnya untuk IPS sebesar 73.3 dan UN IPA sebesar 80.18 yang merupakan rangking tiga tertinggi di Sumatera Barat. Untuk Kota Padang sendiri yang memiliki kecukupan fungsi pelayanan pendidikan nilai UN IPSnya sebesar 71.56 dan UN IPA sebesar 78.01 berada di bawah Kota sawhlunto dan Padangpanjang.

Artinya, kecukupan fungsi pelayanan pendidikan dan keterjangkauan terhadap akses pendidikan ternyata belum linear dengan prestasi dan kualitas pendidikan yang diraih. Tentunya, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya upaya peningkatan suasana pembelajaran di sekolah yang mendukung kepada pencapaian hasil nilai UN yang lebih baik. Upaya peningkatan kualitas suasana pembelajaran ini, memiliki banyak factor yang mempengaruhinya, mulai dari ketersediaan fasilitas yang menunjang kepada suasana pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kualitas guru dan ketersediaan prasarana yang mendukung seperti akses kepada IPTEK pendidikan seperti internet, dan sumber media informasi lainnya sebagai sumber-sumber belajar selaian dari guru dan sekolah. Tentunya factor yang dominan mempengaruhi pencapaian perolehan nilai UN yang terbaik ini memerlukan suatu kajian tersendiri pula, mengingat banyaknya factor yagn akan mempengaruhinya.

2.4.2. Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kondisi guru dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah dan kualifikasinya, sebarannya, dan tingkat kecukupannya. Permasalahan kondisi guru yang dilihat bukan saja jumlahnya tetapi sebarannya setiap sekolah dan keberimbangan bidang studi guru dengan bidang mata pelajaran yang diasuhnya. Terdapat indikasi bahwa guru banyak yang mengajar di luar kompetensi pokoknya, karena mengejar beban 24 jam pelajaran sebagai syarat memperoleh hak sertifikasi guru.

Jumlah guru di provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebanyak 21.372 orang yang tersebar pada 489 sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta. Rata-rata jumlah guru pada setiap sekolah adalah sebanyak 43-44 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran yang ada hal ini sudah mencukupi, tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah kelas dan rombongan belajar yang ada jumlah ini tentunya masih belum mencukupi. Terjadi penumpukan guru pada mata pelajaran tertentu, terutama pada mata pelajaran IPA dan IPS, Teknik, tetapi kekurangan pada guru bidang studi khusus seperti informatika dan keterampilan keprigelan dan kecakapan hidup seperti mengambar, menari, melukis, akuntan, statistic dan keterampilan lainnya yang relevan dengan dunia kerja.

Disamping ketidak seimbangan ketersediaan guru dalam kompetensi yang dilekatkan kepada lulusan SMA dan SMK juga ketidakseimbangan ketersediaan guru dalam sebaran setiap sekolah di wilayah kabupaten dan kota. Ketersediaan guru dan sekolah tertumpuk pada pusat pertumbuhan Kota Padang dengan jumlah sekolahnya sebanyak 2186 sekolah negeri dan swasta dengan jumlah guru 4057 orang dengan ratarata ketersediaan guru setiap sekolah adalah 45 orang ini berada jauh di atas rata-rata ketersediaan guru setiap sekolah di provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.4.2-1 Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah -Sekolah Sumatera barat

Kabupaten dan Kota	Jumlah guru	Persentase guru	Rata-Rata Ketersediaan guru per Sekolah	Jumlah Tenaga Kepedidikan	Persentase	Rata-rata
Kab. Kep Mentawai	266	1.24	19	109	0.87	7.79
Kab. Pasaman	860	4.02	40.95	716	5.69	34.10
Kab. Sijunjung	786	3.68	39.30	632	5.02	31.60
Kab. Lima Puluh Koto	855	4.00	47.50	772	6.14	42.89
Kab. Pasaman Barat	1213	5.68	34.66	725	5.76	20.71
Kab. Dharmasraya	1065	4.98	56.05	297	2.36	15.63
Kab. Solok Selatan	600	2.81	37.50	509	4.05	31.81
Kota Padang	4057	18.98	45.08	2186	17.38	24.29
Kab. Solok	1051	4.92	43.79	922	7.33	38.42
Kab. Tanah Datar	1193	5.58	54.23	799	6.35	36.32
Kab. Pesisir Selatan	2036	9.53	75.41	1158	9.21	42.89
Kota Payakumbuh	940	4.40	40.87	303	2.41	13.17
Kota Padang Panjang	493	2.31	27.39	182	1.45	10.11
Kab. Agam	1660	7.77	59.29	1175	9.34	41.96
Kab. Padang Pariaman	1485	6.95	45.00	886	7.04	26.85
Kota Bukittinggi	1068	5.00	38.14	431	3.43	15.39
Kota Pariaman	797	3.73	37.95	269	2.14	12.81
Kota Solok	648	3.03	36.00	283	2.25	15.72
Kota Sawah Lunto	299	1.40	21.36	225	1.79	16.07
Sumbar	21372	100	43.71	12579	100	25.72

Tabel 2.4.2.1. menjelaskan juga bagaimana perbandingan ketersediaan guru dan sebarannya pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Persentase guru paling tinggi terdapat pada Kota Padang sebanyak 18,98 persen dari total guru di Sumatera Barat, disusul oleh Pesisir Selatan sebesar 9,53 persen dan kabupaten Agam sebesar 7.77 persen. Sedangkan porsi guru paling kecil itu terdapat pada kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya sebesar 1,24 persen dan Kota Sawahlunto sebesar 1,40 persen. Meskipun Kota Padang, dan Agam memiliki porsi terbesar ketersediaan guru, namun rata-rata ketersediaan guru setiap sekolah itu yang mencerminkan ratio guru setiap sekolah paling tinggi pada kabupaten Pesisir Selatan sebesar 75,41 persen, disusul oleh kabupaten Agam sebesar 59,29 persen. Sedangkan ratio guru setiap sekolah paling rendah terdapat pada kota Sawahlunto sebesar 21,36 dan Kota Padangpanjang sebesar 27,39 persen.

Tenaga kependidikan terdiri dari laboran, pustakawan dan administrator sekolah. Persentase jumlah rata rata tenaga kependidikan paling besar terdapat pada kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 42,89 persen disusul oleh kabupaten Agam sebesar 41,96 persen. Meskipun demikian porsi paling banyak itu untuk tenaga kependidikan paling besar tetap ada di Kota Padang sebesar 17,38 persen dan porsi terkecil itu ada di kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,87 persen, dan Kota Padangpanjang sebesar 1,45 persen.

Data –data ini memperlihatkan bahwa provinsi Sumatera Barat masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan terutama untuk laboran dan pustakawan, serta guru bantu bengkel yang memiliki keahlian khusus pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Apabila dirinci ketersediaan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan keahlian khususnya tentunya kekurangan ini semakin banyak terasa, apalagi jika

dikaitkan dengan pencapaian keunggulan dan daya saing pendidikan di level regional, tentunya hal ini sangat mengkuatirkan sekali.



Gambar 2.4.2-2 Rata-Rata Guru Setiap Sekolah Menurut Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat

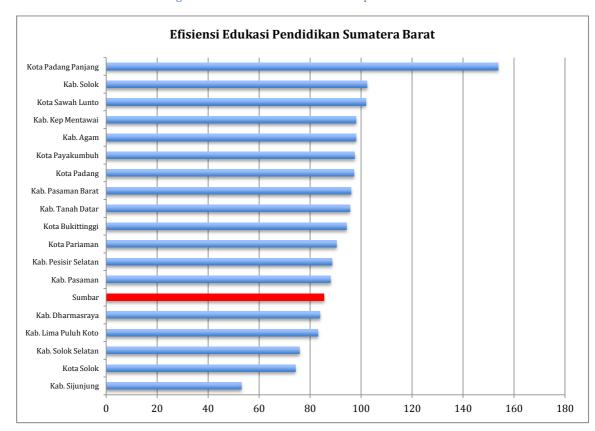
Gambar 2.4.2.1. menjelaskan bahwa terdapat 11 wilayah kabupaten dan kota yang rata-rata jumlah guru nya masih di bawah provinsi dan siasanya sebanyak 8 kabupaten dan Kota rata-rata ketersediaan gurunya sudah diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisisr Selatan, Agam dan Dharmasraya memiliki persentase ketersediaan guru setiap sekolah yang sudah cukup baik, berada diatas rata-rata provinsi yang mencapaia 43,79 persen, meskipun jika dibandingkan dengan ratio guru-siswanya sebesar 1:10,39. Terdapat 3 kabupaten dan Kota yang memiliki rata-rata ketersediaan gurunya paling rendah yakni kabupaten kepulauan Mentawai sebesar 19.00 dan Kota sawahlunto sebesar 21,36 persen, disusul Kota Padangpanjang sebesar 27,39 persen.

Data-data ketersediaan guru diatas memperlihatkan bahwa ketersediaan guru per kelas dan sekolah sudah sangat memadai. Namun ketersediaan guru per bidang studi dan keahlian khusus untuk mengembangkan kompetensi siswa untuk dapat bersaing di level regional ASEAN, tentunya sangat terasa belum memadai. Penyediaan guru untuk bidang keahlian khusus di SMA seperti guru laboran fisika, guru laboran kimia, dan guru laboran biologi, guru bengkel, guru studio yang memiliki keahlian secara khusus untuk melekatkan kemampuan khusus kepada siswa agar memiliki kecakapan khusus yang dibutuhkan di tengah masyarakat terutama juga bagi SMK tentunya sangat terasa belum disiapkan sejak sekarang. Kebanyak guru yang ada bidang keahliannya adalah bidang-bidang ilmu umum seperti IPS, IPA dengan variannya, tetapi guru dengan keahlian khusus atau keterampilan khusus sebagai bekal bagi life skill siswa untuk masuk ke perguruan tinggi dan ke dunia kerja bagi SMK tentunya masih belum cukup tersedia dengan memadai. Oleh karena itu, pengadaan guru dan peningkatan kualitas guru, haruslah diarahkan kepada peningkatan keahlian khusus ini vang *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional maupun ASEAN. Hal ini dikemukakan bahwa bukankah tidak semua lulusan SMA di setting melanjutkan ke perguruan tinggi, sebahagian dari mereka akan terjun ke dunia kerja pada level operator

dan petugas administrasi di sekolah. Sehingga bagi mereka juga diperlukan keterampilan khusus agar memudahkan pekerjaan mereka nantinya.

2.4.3. Kondisi Efisiensi dan Efektifitas Tata Kelola Layanan Pendidikan

Kondisi efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan berkaitan dengan seberapa perolehan maksimum dari suatu kegiatan layanan pendidikan dibandingan dengan pengeluaran yang dilakukan dalam tatakelola layanan pendidikan itu. Efektifitas tata kelola layanan pendidikan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Efisiensi edukasi merupakan ratio antara jumlah siswa baru dengan jumlah siswa yang tamat. Semakin mendekati angka seratus berarti semakin efisien. Artinya, jumlah siswa yang masuk sebanding dengan jumlah siswa yang keluar atau yang lulus. Table berikut mengambarkan tingkat efisiensi edukasi sekolah-sekolah di kabupaten dan kota .

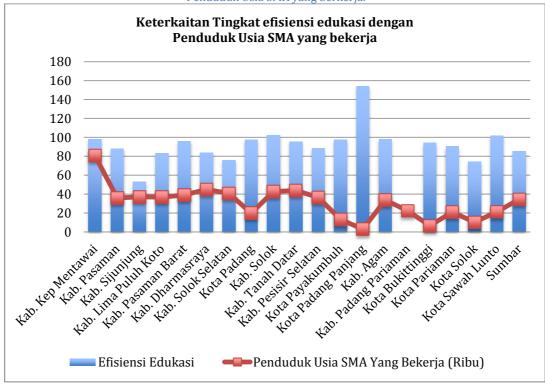


Gambar 2.4.3-1 Tingkat Efisiensi edukasi Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Tabel 2.4.3.1. di atas mengemukakan bahwa tingkat efisiensi edukasi sekolah-sekolah SMA dan SMK di provinsi Sumatera Barat baru mencapai 85,5%, masih terdapat sekitar 15 persen sisanya siswa belum tamat tepat waktu, sehingga angka ini mengambarkan tingkat kualitas pendidikan SMA dan SMK di Sumatera Barat. Diantara sembilanbelas kabupaten dan kota, maka masih terdapat 5 kabupaten dan kota yang tingkat efisiensi edukasinya berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni kabupaten Dharmasraya, Lima puluh kota, Sijunjung, Solok Selatan dan Kota solok.

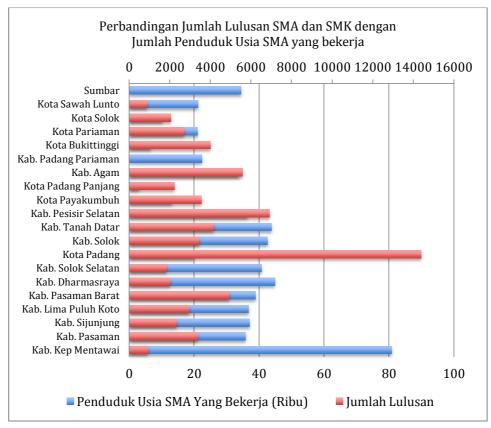
Rendahnya angka efisiensi edukasi ini disamping mengambarkan tingkat kualitas pendidikan juga mengambarkan efisiensi tatakelola pendidikan dalam menerima dan menamatkan siswanya. Semakin tinggi tingkat efisiensi edukasi SMA dan SMK, maka semakin rendah pula jumlah penduduk usia SMA dan SMK yang berkerja. Sebaliknya, apabila angka eisiensi edukasi pendidikan SMA dan SMK semakin rendah, maka semakin banyak pula penduduk usia SMA dan SMK yang berkerja.

Gambar 2.4.3-2 Gambar Grafik Perbandingan Tingkat Efisiensi Edukasi Pendidikan SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia SMA yang berkerja.



Gambar di atas memperlihatkan bahwa kota Padangpanjang memiliki tingkat efisiensi pendidikan paling tinggi yakni 153,79 namun juga memiliki jumlah penduduk usia sekolah SMA yang berkerja paling rendah. Berbeda dengan kabupaten kepulauan Mentawai, memiliki angka efisiensi edukasi sebesar 98,07 tetapi jumlah penduduk usia SMA yang berkerja juga tinggi pula.

Gambar 2.4.3-3 Perbandingan Lulusan SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia SMA yang Bekerja di Sumbar



Gambar 2.4.3.2. di atas mengungkapkan bahwa Kabupaten dan kota yang memiliki jumlah lulusan SMA yang dominan yang berarti tingkat efektifitas tatakelola layanan pendidikannyalebih baik dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang memiliki penduduk usia SMA yang berkerja sedangkan lulusan SMA dan SMKnya lebih kecil, seperti halnya kabupaten kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto. Sehingga terdapat dua kemungkinan penyebabnya; pertama karena jumlah penduduk usia SMA ini masih kecil persentasenya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih untuk masuk ke dunia kerja. Kenyataannya APK PT di kedua wilayah ini memang masih rendah. Kedua, angka putus sekolah memang masih tinggi dan mereka memasuki lapangan pekerjaan dengan lebih awal, walaupun belum memiliki ijazah SMA dan SMK. Wilayah kabupaten dan kota yang memiliki efektifitas tatakelola layanan pendidikan yang baik itu adalah yang lulusan SMA dan SMKnya lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMA yang berkerja adalah terdapat pada kota Padang, Pesisir Selatan, Agam dan Kota Bukittinggi dan lainnya. Artinya semakin efektif tatakelola layanan pendidikan suatu daerah, maka semakin lebih besar jumlah lulusan SMAnya, dan semakin tinggi pula APK PTnya. Sebaliknya pada wilayah pendidikannya yang belum efektif, semakin kecil jumlah lulusan SMAnya semakin tinggi jumlah penduduk usia SMA vang berkeria dan semakin rendah pula APK PTnya.

2.4.4. Kondisi Implementasi pendidikan karakter layanan pendidikan

Pendidikan karakter layanan pendidikan merupakan konsep pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang terbentuk sebagai hasil dari proses internalisasi berbagai nilai-nilai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak peserta didik di lingkungan social dan alamiahnya (Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen dikmen Kemendiknas, 2016). Sehingga dalam membangun budaya dan karakter bangsa Indonesia, maka dirumuskan 18 nilai dan sikap yang menjadi landasan karakter siswa sebagai luaran dari layanan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai itu adalah:

1. Religius

2. Jujur

3. Toleransi

4. Disiplin

5. Kerja Keras

6. Kreatif

7. Mandiri

8. Demokratis

9. Rasa Ingin Tahu

10. Semangat Kebangsaan

11. Cinta Tanah Air

12. Menghargai Prestasi

13. Bersahabat/Komunikatif

14. Cinta Damai

15. Gemar Membaca

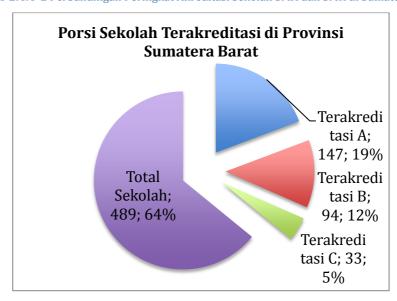
16. Peduli Lingkungan

17. Peduli Social

18. Tanggung Jawab

Semua nilai karakter kepribadian bangsa ini harus tercermin dalam standar kelulusan (SKL) siswa di SMA dan SMK di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat dilakukan apabila sekolah SMA dan SMK sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 di setiap sekolahnya. Sehingga pada setiap mata pelajaran sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter unggul di atas pada system pembelajarannya, yang pada gilirannya akan membentuk dan melahirkan budaya sekolahnya sendiri. Setiap sekolah harus mampu mengembangkan karakternya dari ke delapan belas nilai-nilai inti budaya bangsa di atas dengan mengembangkan nilai-nilai karakter masing-masing melalui proses pembeajaran baik yang bersifat kurikulum maupun yang non kurikuler.

Data empiris untuk upaya sekolah mengimplementasikan pendidikan karakter akan terlihat dari usaha untuk memenuhi standar mutu pendidikan nasional (SNP) yang dibuktikan dengan terpenuhinya standar pendidikan nasional yang diawali dengan penetapan SKL, standar isi, standar proses, sarana dan prasarana, standar guru tenaga pendidik , standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di sekolah melalui pengajuan akreditasi sekolah, sehingga diyakini, apabila sekolah sudah mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat akreditasi A dan B bahkan C, berarti pendidikan karakter sudah mulai dibangun dan dikembangkan di sekolah ini melalui perumusan nilai-nilai inti yang dianut oleh warga sekolah menuju sekolah berkualitas dan unggul. Berikut gambaran sekolah sekolah yang telah melakukan akreditasi untuk standar mutu pendidikannya di Sumatera Barat.

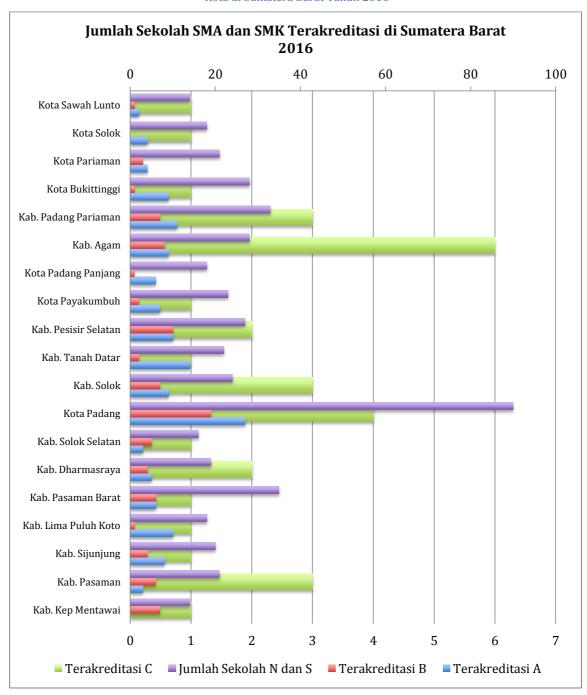


Gambar 2.4.4-1 Perbandingan Peringkat Akreditasi Sekolah SMA dan SMK di Sumatera Barat

Gambar 2.4.4.1. di atas memberikan informasi bahwa dari sebanyak 489 jumlah sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat tahun 2016 yang sudah memperoleh nilai akreditasi sekolah "A" adalah sebanyak 147 sekolah atau 19% dari sekolah yang ada. Sedangkan sekolah yang memperoleh peringkat akreditasi "B" adalah sebanyak 94 sekolah SMA dan SMK atau sebesar 12% dari sekolah yang ada, dan terakhir jumlah sekolah yang memperoleh peringkat akreditasi "C" berjumlah 33 sekolah atau hanya 5% dari total sekolah yang ada. Secara keseluruhan sekolah SMA dan SMK yang sudah memperoleh peringkat akreditasi sebesar 36% sisanya sebanyak 64% sekolah di Sumatera Barat belum mengajukan dan memperoleh peringkat akreditasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengimplementasian pendididkan karakter di sekolah-sekolah yang belum mengajukan status akreditasi ini belum tersusun dan terencana dengan baik.

Alasan kenapa sekolah belum mengajukan akreditasi pada saat ditanya pada saat observasi dilapangan dikatakan karena mereka belum mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya. Penyebab utamanya belum mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya disebabkan karena belum terpenuhinya standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama kemampuan guru untuk mengimplementasikan pelaksanaaan kurikulum 2013 yang masih belum memadai, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik di sekolah seperti system informasi an teknologi yang belum siap, dan seterusnya.

Gambar 2.4.4-2 Jumlah Sekolah Terakreditasi menurut Peringkat akreditasi Berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2016



Tabel 2.4.4.1. di atas memberikan informasi bahwa Kota Padang memiliki jumlah sekolah yang terakreditasi "A" dan "B" paling banyak masing-masing adalah sebanyak 27 sekolah terakreditasi "A" dan 19 sekolah terakreditasi "B". disusul oleh kabupaten Tanah Datar sekolah terakreditasi "A" sebanyak 14 sekolah dan terakreditasi "B: sebanyak 2 sekolah. Posisi ketiga jumlah sekolah terakreditasi "A" ditempati oleh kabupaten Pesisir Selatan bersama kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 10 sekolah., untuk kabupaten Tanah Datar terdapat 2 sekolah terakreditasi"B" dan 1 sekolah untuk kabupaten Lima Puluh Kota. Sisanya yang paling banyak adalah sekolah dengan peringkat terakreditasi "C" dan belum terakreditasi.

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tentunya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan social di tengah masyarakat, karena sekolah merupakan bagian dari system kelembagaan social yang menjadi barometer bagi terjadinya proses internalisasi nilai-nilai budaya di tengah masyarakat. Apabila kejadian tindak pidana di tengah masyarakat masih terus meningkat, maka dapat dikatakan institusi pendidikan seperti sekolah ini menjadi kunci untuk mengontrol terjadinya kejadian tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk mengurangi tindak kejadian pidana di tenagh masyarakat maka pendidikan karakter di sekolah yang pada gilirannya akan tertular dalam pergaulan di tengah masyarakat akan berdampak menjadi lebih baik, sehingga kejdian tindak pidana akan berkurang dengan sendirinya. Hal ini merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, karena warga sekolah merupakan contoh perilaku tauladan di tengah masyarakat baik melekat pada diri guru dan siswanya di tengah lingkungan sosialnya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

Pada bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pendidikan, telaahan visi, misi dan program dinas pendidikan, dan telaahan renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi permasalahan

Pembangunan pendidikan di Sumatera Barat akan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga Disdik Sumatera Barat dapat mendorong penguatan layanan pendidikan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun bentuk permasalahan dan tantangan pembangunan yang terjadi di tingkat Nasional dan ada juga di tingkat daerah adalah sebagai berikut:

3.1.1. Belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan.

Sebaian besar pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di erasebelumnya. Namun masih ada pelaku-pelaku pelaksana pendidikan yang masihkurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikandasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi danpenyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah,para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktifdalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikanmasih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, danprofesionalisme guru. Di Sumatera Barat, pelaku-pelaku pendidikan sudah melakukan perannya masing-masing, tetapi belum seoptimal yang diharapkan. Seperti belum semua anak usia 16-18 tahun tertampung atau terlayani pada satuan pendidikan menengah, belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan dan contoh lain adalah belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di satuan pendidikan.

3.1.2. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal

Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Di Sumatera Barat, pelaksanaan wajib belajar belum terlayani dengan baik. Hal ini dikarenakan belum semu anak usia 16-18 tahun yang tertampung atau terlayani pada satuan pendidikan menengah.

Faktor kendala dan penyebab belum optimalnya pelayanan pendidikan pada anak usia 16-18 tahun yagn tertampung dan terlayani adalah kapasitas sarana dan prasarana sekolah yang belum memungkinkan untuk menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang ada, disamping kekurangan kapasitas lokal belajar, juga adalah karena kekurangan jumlah guru yang akan mendorong dan memfasilitasi proses

pembelajaran di sekolah. Pada sekolah yagn memiliki sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai, maka daya tampungnya menjadi berlebih. Sebaliknya pada sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang, justru dengan daya tampung berlebih. Artinya terjadi ketidakmerataan sarana prasarana dan ketersediaan guru yang cukup disekolah menegah ini.

3.1.3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa sehingga ketika selesai melaksanakan proses wajib belajar 12 tahun, peserta didik kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Di sumatera barat, sebagai contoh untuk tingkatan lulusan SMK ditemukan ketidak selarasan lulusan SMK dengan dunia kerja dan industri dan beberapa contoh lainnya.

3.1.4. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. Selain itu jumlah yang dimiliki Sumatera Barat dan distribusi guru di Sumatera Barat belum merata, terutama di daerah 3T. Lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terbatas terhadap kualitas layanan, berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru.

3.1.5. Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri atau Disintegrasi Bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkotika, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk menyiapkan generasi penerus Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, bermadani serta berdaya saing, Disdik Sumatera Barat harus menyiapkan langkah strategis yang bersinergi dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, di lingkungan bahkan dalam berkeluarga. Selain dari enam permasalahan yang sama antara nasional dan dareah tersebut, masih ada beberapa masalah yang berda di Sumatera Barat, yakni belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan, belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di satuan pendidikan, tata kelola manajemen sekolah belum optimal dan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan terlihat keloresi antara Pembangunan PendidikanNasional (RenstraKemendikbud 2015-2019) dengan RPJMD (Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumatera Barat 2016-2021 danRenstraDinasPendidikan Provinsi Sumatera Barat, yakni terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong, terwujudnya sumatera barat yang madani dan sejahtera dan terwujudnya sumberdaya manusia sumatera barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing.

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak akan terlepas dari rencana pembagunan pendidikan pada provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021. Selain itu, juga sangat terkait erat dengan dokumen Rencana Strategis Pembanguan Pendidikan Nasional (2015-2019. Oleh karena itu dalam menyusun dokumen rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi oleh organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat tentu saja mempedomani kedua dokumen tersebut di atas.

Bentuk keterkaitan dalam rencana pembangunan pendidikan di Sumatera Barat sudah diawali dengan saat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat. Visi pembangunan pendidikan nasional itu menurut renstra pembangunan pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 2015-2019 (Kemendikbud RI) adalah sebagai berikut:

"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong"

Visi pembangunan pendidikan nasional ini kemudian dicapai dengan merumuskan misi pembangunan pendidikan nasional yang mencakup lima aspek pembangunan pendidikan nasional yakni:

- 1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- 2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata
- 3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- 5. Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan public.

Tujuan pembangunan pendidikan nasional itu adalah tentunya sangat terkait dengan misi yang telah di rumuskan yakni:

- 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan PAUD
- 2. Perluasan akses pendidikan dasar bermutu
- 3. Peningkatan kapasitas akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- 4. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
- 5. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pendidikan karakter
- 6. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- 7. Peningkatan jati diri bangsamelalui pemakaian bahasan sebagai pengantar
- 8. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntanbel dengan melibatkan public.

Visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat telah dirumuskan dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan secara nasional ini, disamping yang tidak kalah pentingnya adalah sangat berpedoman juga kepada visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah derah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang tentunya merupakan turunan dari visi, misi dan tujuan dari Gubernur Sumatera Barat terpilih pada periode 2016-2021. Visi pembangunan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam RPJMD tahun 2016-2021 itu adalah:

"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Visi gubernur Sumatera Barat yang terpilih ini telah dirumuskan ke dalam misinya sehingga mudah dilaksanakan dan menjadi arah pembangunan Sumatera Barat secara umum ke depan, tentunya tidak terlepas pula dengan pembangunan pendidikannya. Adapun misi pembangunan Sumatera Barat ke depan itu adalah:

- 1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
- 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
- 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
- 5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi yang sangat terkait dengan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat ini adalah misi Gubernur Sumatera Barat yang ketiga yakni meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi. Misi ini akan menjadi fokus bidang pembangunan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya di Sumatera Barat. Sedangkan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat itu dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masayarakat tentang pentingnya pendidikan karakter
- 2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat;
- 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna;
- 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat ini juga telah dikembangkan menjadi sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yakni:

- 1. Meningkatnya tingkat pendidikan;
- 2. Meningkatnya integritas peserta didik;
- 3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
- 4. Meningkatnya daya saing lulusan
- 5. pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja;
- 6. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca;
- 7. Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Sasaran pembangunan pendidikan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2016- 2021 ini telah menjadi landasan bagi organisasi perangkat daerah pendidikan di Sumatera Barat untuk menyusun target-target terukur yang hendak dicapai pada periode lima tahun ke depan.

Berdasarkan kepada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan nasional dan kemudian ditambahkan pula oleh visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat, maka kemudian disusun pula visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam rencana strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tahun 2016- 2019. Adapun visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam Renstra OPD Pendidikan Nasional Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing"

Visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat ini telah memperhatikan tahapan pembangunan pendidikan nasional dalam rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang, dimana pada RPJMN tahun 2015-2020 telah dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan daya saing regional dalam rangka menuju dan mempersiapkan peningkatan daya saing bangsa. Sehingga dalam visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat mencantumkan kalimat terwjudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing.

Visi ini kemudian dikongkritkan dengan merumuskan misi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang berlandaskan kepada misi pembangunan pendidikan nasional dan provinsi Sumatera Barat yakni:

- 1. Mewujudkan akses dan pemerataan layanan pendidikan
- 2. Mewujudkan kompetensi, dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
- 3. Mewujudkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
- 4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi tata kelola layanan pendidikan
- 5. Mewujudkan pendidikan berkarakter madani

Tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya sangat terkait dengan misi pembangunan pendidikan yang telah dikemukakan di atas, ini telah mencakup pilar pembangunan pendidikan nasional dan provinsi yakni pemerataan akses dan layanan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan peningkatan profesionalisme guru. Adapun tujuan pembangunan pendidikan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan sumatera barat
- 2. Peningkatan kompetensi dan professionalisme guru dan tenaga kependidikan
- 3. Peningkatan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
- 4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan
- 5. Pengimplementasian pendidikan berkarakter madani

Adapun sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat itu tentunya sangat terkait pula dengan tujuannya yakni:

- 1. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan Sumatera Barat
- 2. Meningkatnya kompetensi dan professionalism guru dan tenaga kependidikan
- 3. Meningkatnya mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
- 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan
- 5. Terimplementasikannya pendidikan berkarakter madani

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Sumatera Barat ini, maka terlihat jelas bahwa saling keterkaitan diantaranya baik keterkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembagunan pendidikan di tingkat nasional dan provinsi, tetapi kuga saling keterkaitan antara visi, misi dan tujuan serta sasaran itu sendiri sebagai satu kesatuan dalam menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan ke depannya. Visi yang dirumuskan sangat futuristik namun dengan perumusan misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistik, sehingga mudah diukur sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Untuk merumuskan visi dan misi yang sesuai dan tepat, maka dibutuhkan kesesuaian-kesesuaian antara unsur-unsur penting di dalam sebuah kesatuan atau institusi terkait. Penyesuaian ini berguna untuk menghasilkan sebuah kebijakankebijakan yang bermanfaat dan berdampak dalam masa tertentu baik dengan institusi yang membuat atau institusi yang ada di bawahnya. Untuk merumuskan kebijakankebijakan Disdik Sumatera Barat, maka perlu di sesuaikan kebijakan yang akan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada Renstra Kemendikbud. Pada masa periodesasi 2015-2019 ini, dalam Renstra Kemendikbud menyebutkan bahwa "pemerintah wajib memajukan pendidikan mengusahakan dengan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Berdasarkan isi Renstra tersebut, maka jelaslah bahwa Disdik Sumatera Barat, sebagai pemerintah wajib memajukan pendidikan, pelayanan serta pengembangan-pengembangan keilmuan pada seluruh unsur terkait yang ada di dalam Disdik Sumatera Barat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan renstra pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya memperhatikan rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 2015-2019 dimana pembangunan pendidikan nasional itu didasarkan atas beberapa paradigma yaitu: Paradigma pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Selanjutnya, terdapat empat tema pembangunan pendidikan secara pendidikan nasional itu yaitu: peningkatan kapasitas dan modernisasi, penguatan pelayanan pendidikan, menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional, dan peningkatan daya saing internasional. Pada saat sekarang ini tahap pembangunan pendidikan nasional itu berada pada tahap ketiga yakni menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Tema pembangunan pendidikan 2015-2019 adalah peningkatan daya saing regional ini tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola manajemen sekolah, agar kualitas proses belajar mengajar menjadi bermutu, hanya lembaga pendidikan dan proses pendidikan yang bermutulah yang mampu mengungguli persaingan di wilayah regional ini. Oleh karena itu diperlukan penetapan kriteria dan indicator mutu pendidikan yang mampu bersaing secara regional paling tidak di wilayah ASEAN.

Penentuan konsep daya saing dalam pendidikan tentu merupakan kunci awal untuk merumuskan kriteria dan indicator daya saing pendidikan daerah secara regional itu. Menurut World Bank (2003) ada 3 factor penentu saya saing yakni: 1). factor driven yang mencakup kelembagaan pendidikan, terutama system manajemen sekolah yang dikembangkan, infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi pendidikan yang mencakup kecukupan jumlah guru, kecukupan pendidikan dan pelatihan guru, kecukupan kompetensi guru dan keberadaan siswa. 2). Efficiency driven, mencakup ketersediaan system informasi dan teknologi pembelajaran, system pendidikan dan pelatihan guru yang regular dan kontinyu. 3). Innovation driven yang mencakup penciptaan lingkungan sekolah sekolah yang menyenangkan sesuai dengan usia pembelajar, dan inovasi layanan pendidikan untuk membentuk karakter madani yang unggul dan berdaya saing regional.

Capaian pembangunan pendidikan menengah dikenakan pada upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014.

Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, capaian ditunjukkan oleh 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2013. Pemerintah juga telah berusaha secara terusmenerus untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya juga berkaitan dengan pola dan struktur penggunaan ruang untuk kepentingan pembangunan. Rencana sistem perkotaan provinsi Sumatera Barat, telah menempatkan kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), yang harus didukung oleh wilayah sekitarnya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) seperti Kota Bukittinggi, Kota Solok, Aro Suka, Kota Pariaman, Kota Painan. Dimana PKW ini harus pula didukung oleh Pusat kegiatan lokal (PKL)nya. Kota padang sebagai PKN merupakan pusat pengembangan ekonomi yang berbasis kepada industri pengolahan dan jasa, termasuk jasa pendidikan karena kota Padang juga dikenal dengan kota pendidikan.

Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi : Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dapat dikembangkan sebagai Kota Metropolitan dengan peran masing- masing sebagai berikut :

- a. Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti,
- b. Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit,
- c. Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil

Sebagai pusat kegiatan nasional, dengan pusat aktifitas utama adalah industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan, haruslah mampu mendukung kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan bagi pusat-pusat kegiatan di bawahnya. Pusat kegiatan pengembangan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi tentunya harus dimainkan oleh kota Padang, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan pendidikan seperti pusat pelayan penelitian, pusat pelayanan sistem inovasi daerah (SIDA), pusat pengembangan entrepreunuer.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional. Selain itu pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman provinsi ini dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Pengembangan sistem transportasi dilakukan secara terintegrasi yang meliputi rencana pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Jaringan transportasi tentunya dibutuhkan antar pusat layanan pendidikan dan penelitian yang ada.

Pengembangan jaringan prasarana energi di Provinsi Sumatera Barat terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan. Penyediaan energi listrik di wilayah Sumatera Barat untuk jangka pendek, jika dilihat dari pembangkit yang ada sudah melebihi kapasitas dan digunakan untuk kebutuhan energi listrik di provinsi lain yang tergabung dalam sistem jaringan interkoneksi. Sampai tahun 2032 diperkirakan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Barat mencapai 7.300 GWH. Kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya sebesar 6,3%. Arah pengembangan pasokan jaringan listrik untuk kebutuhan pelayanan pendidikan dan penelitian dan sistem inovasi diperlukan keterjaminannya, agar kegiatan pelayanan pendidikan tidak terganggu.

Jaringan sistem telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk pada pelayanan pendidikan, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa sentral telepon otomatis (STO) yang tersebar pada seluruh kota dan kabupaten di provinsi ini. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit. Prasarana telekomunikasi dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi kebutuhan pada pelayanan pendidikan juga.

Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait. Ketersediaan air baku untuk kepentingan pelayanan pendidikan dan penelitian pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Prasarana lingkungan terdiri atas:

- 1) Tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu (regional).
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- 3) Sistem drainase.
- 4) Sistem pengelolaan air minum (SPAM).
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat, termasuk sarana dan prasarana pendidikan

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Rencana pola ruang untuk pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya ini berkaitan dengan penciptaan suasana sekolah yang menyenangkan dengan konsep sekolah hijau.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya. Kawasan strategis ini terdiri atas :

a. Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Sumatera Barat terdapat 4 Kawasan Strategis Nasional yang meliputi:

- 1) Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup
- 2) Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup
- 3) Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
- 4) Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan
- b. Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi. Perwujudan Kawasan Strategis provinsi dilihat dari :
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat 10 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat
 - 2) Sosial Budaya yang terdapat 1 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar

Pengembangan kawasan strategis ini, berkaitan dengan kepentingan upaya pelestarian lingkungan hidup yang dianggap penting mempengaruhi wilayah lainnya dan menjaga kawasan kota utama mampu menjalankan perannnya dengan baik. Dalam kaitannya dalam pembangunan pendidikan kawasan strategis tentunya harus pula didukung oleh pelayanan pendidikan baik untuk penelitian dan konservasi maupun untuk kegiatan pembelajaran untuk pelestarian lingkungan.

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra pendidikan Sumatera Barat. Kondisi lingkungan strategis yang mengambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

- 1. Trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung terus menguat dan didukung oleh beberapa indikator makro perekonomian seperti peningkatan kelas menengah, peningkatan jumlah untuk kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menjaga keseimbangan ekonomi
- 2. Peningkatan daya saing
- 3. Perkembangan demografi
- 4. Spektrum tenaga kerja terampil
- 5. Kondisi sosial masyarakat (role model)
- 6. Kondisi jati diri bangsa

Aspek lingkungan strategis diatas sangat mempengaruhi pada kebijakan pembangunan layanan pendidikan di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkatkan diperlukan untuk serapan tenaga kerja terampil dan penciptaan peluang usahawan ekonomi sebagai hasil pendidikan kewirausahanan. Peningkatan daya saing berarti upaya badan layanan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas calon tenaga kerja yang dididik di lembaga pendidikan menengah dan tinggi. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkatkan dan bonus demografi yang dialami Indonesia, karena semakin besarnya penduduk usia muda atau usia sekolah dan semakin tingginya umur harapan hidup ini membawa konsekwensi yang penting untuk pembangunan sumberdaya manusia yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengambil peran penting dalam percaturan perdagangan di dunia global.

3.5. Penentuan Isu Isu strategis

Penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh berbeda dengan isu yang berkembang dan beredar di kalangan nasional, diantaranya adalah penciptaan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan penciptaan pembelajar yang berdaya saing. Pengembangan lingkungan pendidikan yagn menghargai multikultural, pembentukan karakter madani melalui pendidikan. Semuanya diuraikan satu persatu berikut ini.

3.5.1. Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Menciptakan Pembelajar yang berdaya saing

Untuk menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan dan pembelajaran yang berdaya saing di lingkungan sekolah, diperlukan langkah-langkah kongkrit agar suasana tersebut bisa tercapai. Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya akan menciptakan suasana yang baik, baik untuk siswa ataupun pengeloala yang ada d dalamnya. Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga setelah siswa menyelesaikan masa studi dan melanjutkan ke dua kerja, mereka akan bersaing dengan baik serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang berasal dari sekolah menengah kejuruan.

Membicarakan lapangan kerja, sebagai industri untuk menghasilkan dan membina tenaga kerja profesional dan handal, maka dibutuhkan kerjasama dan kolerasi anta sekolah dan dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

3.5.2. Pengembangan Lingkungan Pendidikan yang Menghargai Multi Kultural dan Kebinekaan

Pemerintah daerah dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan. Sesuai dengan visi Kemdikbud 2015-2019 yang berbunyi terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong, maka

luaran dari misi ini juga mengharapkan lingkungan pendidikan yang saling menghargai multi kultural dan kebinaan yang bergotong royong. Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- 2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
- 3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible);
- 5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
- 6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; dan
- 7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kemadinian dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas agar terciptanya suasana yang kondusif. Penguatan peran orang tua, masyarakat, industri dan organisasi sosial dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, mereka diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

3.5.3. Pembentukan Karakter Madani Melalui Layanan Pendidikan

Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera, merupakan visi dari RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Dari visi itu Disdik Sumatera Barat berangkat dan memaknai bahwa karakter madani dapat diwujudkan melalui pendidikan. Madani berarti segala sesuatu yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban. Ilmu atau pendidikan yang

madani akan membentuk karakter anak didik yang cerdas, baik cerdas spiritual (rohani dan bathin), cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual (cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan), dan cerdas kinestetik.

Hal tersebut tidak akan terwujud dari peran sekolah, guru dan pelayan pendidikan saja, tetapi juga semua aspek pendukung yang ada di sekitar peserta didik tersebut seperti orang tua, masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, organisasi sosial, pemerintah serta semua aspek pendukung untuk membentuk katakter madani melalui layanan pendidikan ini. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan komponen penting untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani.

3.6. Isu Isu strategis Pendidikan Sumatera Barat

Pengalian isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Sumatera Barat menggunakan kerangka berpikir faktor penentu daya saing pendidikan provinsi Sumatera Barat yakni: pertama faktor driven yang meliputi kelembagaan pendidikan, sistem manajemen sekolah, infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi sekolah yang terlihat dari kecukupan guru, kecukupan kompetensi guru dan kecukupan pelatihan guru. Faktor penentu daya saing kedua adalah efficiensi driven meliputi kondisi sistem informasi dan teknologi pembelajaran dan sistem pendidikan dan pelatihan guru. Sedangkan faktor penentu daya saing ketiga adalah innovation driven meliputi lingkungan sekolah yang menyenangkan dan inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter madani.

Pembangunan pendidikan Sumatera Barat selama ini tentu saja memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan yang merupakan factor internal dalam system pendidikan Sumatera Barat. Untuk mengidentifikasi sejumlah kelemahan dan tantangan yang merupakan factor dari dalam (internal), maka digunakan kerangka analisis SWOT (Lihat Rangkuti, F (2000). Dalam menyusun matrik table SWOT untuk menemukan strategi pembangungan penididikan sumatera Barat yang pada tahap ini berada di upaya peningkatan daya saing wilayah secara regional, maka dikemukakan dulu sejumlah factor strategis internal (IFAS) dan factor strategis eksternal (EFAS) dengan cara memberikan bobot masing-masing factor sebagai factor yang sangat penting dan kurang penting, lalu menghitung ratingnya dengan memberikan derajat kepentingannya dengan skala 1-4, sehingga di peroleh skor pembobotan., dengan demikian dapat dikemukakan factor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat dan disusun matrik SWOTnya untuk menentukan strategi peningkatan (SO, WO) dan strategi perbaikan (ST dan WT).

Kekuatan dan kelemahan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai factor internal dalam pembangunan pendidikan selama ini. Factor strategis diperoleh dari komponen yang membentuk daya saing pendidikan Sumatera Barat yang terdiri dari factor driven, efisiensi driven dan innovation driven, Sedangkan pembobotan dilakukan dengan memberikan derajat kepentingan factor ini dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat secara regional dengan skala sangat penting (1,0) sampai skala tidak penting (0,0), pembobotan ini murni didasarkan kepada keputusan kepakaran saja (expert judgement), sehingga akan berbeda diantara pakar yang menganalisisnya. Demikian pula untuk penentuan rating; merupakan skala pengaruh factor strategis ini terhadap kondisi daya saing pendidikan saat ini dengan memberikan skala 4 (sangat berpengaruh) sampai 1 (kurang berpengaruh). Skor total

dari bobot dikalikan dengan rating memperlihatkan tingkat kekuatan dan kelemahan daya saing pendidikan Sumatera Barat saat ini. Semakin besar skor totalnya semakin besar pengaruh factor internal dan eksternal daya saing pendidikan ini.

Kekuatan daya saing pendidikan Sumatera Barat pertama terletak pada keberadaan lembaga pendidikan menengah yang terdiri dari SMA dan SMK yang sudah memadai apabila dilihat dari jumlah dan sebarannya di setiap kabupaten dan kota. Bahkan pada setiap kecamatan sudah terdapat SMA dan SMK di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Menurut standar Unesco, satu sekolah akan melayani 500-1000 penduduk tentunya ini dapat dicapai. Factor yang menjadi kekuatan kedua untuk peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat adalah system manajemen sekolah yang didasarkan kepada kelayakan dan kepatutan dan berbasis merit system. Manajemen sekolah diarahkan kepada peningkatan system penjaminan mutu yang bermuara kepada pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah menengah.

Faktor infrastruktur sekolah sangat memegang peranan pentng dalam meningkatkan daya saing, melalui penggunaan dana bantuan operasional sekolah, sekolah mememiliki sumber pendanaan untuk melengkapi infrastruktur sekolah, disamping sumbangan dari masyarakat dalam bentuk kepedulian komite sekolah untuk melengkapi semua infrastruktur sekolah akan terpenuhi syarat yang diharuskan oleh system penjaminan mutu sekolah. Faktor internal terakhir yang memberikan potensi untuk mendorong kearah peningkatan daya saing regional pendidikan Sumatera Barat adalah kesehatan organisasi sekolah yang terlihat dari kecukupan jumlah guru dan pendidikan guru. Jumlah guru pada semua tingkatan sekolah sudah memadai, walaupun distribusinya belum merata.

Namun jumlah guru yang memadai dan ditambah dengan banyaknya lembaga perguruan tinggi yang mencetak calon guru dan berkerja sama dengan sekolah di wilayah ini, merupakan suatu kekuatan yang akan mendorong penciptaan kesehatan organisasi sekolah di Sumatera Barat.

Tabel 3.6-1 Faktor Strategis Internal Peningkatan Daya Saing Pendidikan Sumatera Barat

Factor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Kekuatan: 1 Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang	0,10	2	0.20	Lembaga pendidikan menengah dengan system manajemen
memadai 2 Sistem manajemen sekolah 3 Infrastruktur sekolah	0.10	3	0.30	dan infrastruktur sekolah yang sehat akan mendorong
4 Kesehatan organisasi sekolah	0.15 0.15	3 4	0.45 0,60	kepada daya saing regional pendidikan

Kelemahan:				Sistem informasi
1 Kondisi system informasi	0.10	4	0.40	teknologi
teknologi pembelajaran				pembelajaran yang
belum memadai				lamban, karena
2 Kecukupan kompetensi dan				rendahnya
pelatihan guru rendah (hasil	0.15	4	0.60	kompetensi guru
UKG rendah)				untuk mengadopsi
3 Lingkungan sekolah yang				teknologi informasi
kurang menyenangkan				dan kecenderungan
karena cenderung dengan	0.15	3	0.45	lingkungan sekolah
mudah disusupi paham				yang mudah disusupi
radikalisme				oleh nilai radikal
4 Inovasi layanan pendidikan				karena belum
yang membentuk karakter	0.10	3	0.30	terbentuknya
rendah				karakter pendidikan
Total	1.00		3,30	

Berdasarkan kepada tabel di atas, terlihat bahwa faktor internal berupa kekuatan dari infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi sekolah memiliki bobot yang lebih tinggi untuk menentukan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Sedangkan kelemahan daya saing pendidikan Sumatera Barat terletak paling tinggi bobotnya pada kondisi sistem informasi dan teknologi pembelajaran yang masih jauh tertinggal dengan sistem informasi yang berkembang diluar, dan masih rendahnya kompetensi guru dalam penguasaan ICT pembelajaran ini telah memungkinkan mudahnya kecenderungan masuk paham radikal ke dalam lingkungan sekolah, sehingga inilah yang mengancam kepada pembentukan karakter siswa yang relegius, cerdas dan bertanggungjawab. Lembaga pendidikan menengah dengan system manajemen dan infrastruktur sekolah yang sehat akan mendorong kepada daya saing regional pendidikan.

Skor total untuk faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan daya saing pembangunan pendidikan Sumatera Barat adalah mencapai 3,30 yang disumbang paling tinggi oleh bobot kesehatan organisasi sekolah yang ditunjukkan oleh kecukupan jumlah guru dan distribusinya dan kecukupan kompetensi dan hasil uji kompetensi guru yang masih rendah. Sistem informasi teknologi pembelajaran yang lamban, karena rendahnya kompetensi guru untuk mengadopsi teknologi informasi dan lingkungan sekolah yang cenderung dengan mudah disusupi oleh nilai radikal karena belum terbentuknya karakter pendidikan belum sejalan dengan kemajuan system informasi dari luar.

Tabel 3.6.1. di atas memperlihatkan bahwa faktor strategis ekternal berupa peluang peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat dengan bobot paling tinggi itu adalah terdapatnya sistem akreditasi sekolah untuk mendorong dan menjamin kepada pencapaian sekolah bermutu dan terdapatnya lembaga sertifikasi guru yang dikembangkan secara nasional dan daerah akan mendorong kepada penciptaan sekolah yang bermutu di Sumatera Barat. Sedangkan pada bobot yang paling tinggi pada sisi ancaman yang akan dihadapi dalam meningkatkan daya saing pendidikan Sumatera Barat adalah mudahnya masuk sistem informasi dan komunikasi dan teknologi yang menunjang sistem pembelajaran.

Tabel 3.6-2 Faktor strategis eksternal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat

Factor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Peluang : 1. Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang	0,10	4	0.40	Sistem kelayakan sekolah dan penilaian prestasi sekolah telah
mendorong kepada sekolah bermutu 2. Penilaian sekolah berprestasi	0.10	3	0.30	mendorong perlunya kerjasama dengan sekolah mitra di luar
nasional	0.15	3	0.45	negeri
3. Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN 4. Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional	0.15	4	0,60	J
Ancaman :				
1. Mudahnya masuk informasi teknologi ke lingkungan sekolah secara bebas	0.10	4	0.40	Masuknya system informasi dan teknologi pembelajaran secara
Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga	0.15	3	0.45	bebas menuntut kepada perbaikan mutu kompetensi guru di
3. Standarisasi sekolah nasional dan internasional	0.15	3	0.45	bidang penguasaan ICT dan penguatan nilai-
4. Kecenderungan akan terjadinya Disintegrasi	0.10	2	0.20	nilai kebangsaan dan local untuk
bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-				membentengi nilai-
sumber belajar di sekolah				nilai yang mengancam keutuhan NKRI
Total	1.00		3,25	

Berdasarkan kepada nilai akhir dari faktor internal dan ekternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat, maka terlihat bahwa nilai faktor internal lebih tinggi dari faktor ekternal itu sendiri, sehingga hal ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan daya saing pendidikan di Sumatera Barat.

Adapun strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat (S-O)yang dapat dilakukan dalam selama periode renstra ke depan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan mutu dan daya saing sekolah melalui perbaikan infrastruktur sekolah dan penyehatan organisasi sekolah untuk mampu berprestasi unggul dilevel regional
- 2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk penguasaan ICT dengan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan dan mitra di luar negeri.

3.

Strategi penguatan ini diharapkan mampu memayungi program-program peningkatan mutu pendidikan melalui kelayakan sekolah dan sertifikasi guru oleh lembaga sertifikasi pendidikan, mulai dari program peningkatan infrastruktur sekolah, peningkatan sistem tatakelola dan program peningkatan kesehatan organisasi sekolah yang semuanya harus bermuara kepada penciptaan sekolah yang layak, unggul, berprestasi nasional dan mampu menjalun kerja sama dengan sekolah mitra di luar negeri, atau paling tidak pada level ASEAN.

Sedangkan strategi perbaikan untuk peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat (W-T) yang dapat dilakukan dalam periode renstra ke depan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan sistem tata kelola sekolah melalui perbaikan sistem informasi teknologi yang menunjang proses pembelajaran untuk menyaring informasi dan teknologi yang masuk secara bebas dalam lingkungan sekolah
- 2. Peningkatan pendidikan karakter melalui penyehatan lingkungan internal sekolah yang menyenangkan dengan menanamkan nilai –nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran oleh guru dan warga sekolah.

Diharapkan keempat strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional diatas dapat menghasilkan dan memayungi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan dengan sasaran utamanya adalah terciptanya daya saing kualitas pendidikan Sumatera Barat di level regional yang ditandai dengan terdapatnya sekolah yang berakreditasi internasional, terdapatnya sekolah yang menjalin kerjasama dengan sekolah mintra regional untuk peningkatan mutu pembelajaran, mutu guru dan mutu sistem tatakelola untuk meningkatkan kelayakan sekolah menegah di Sumatera Barat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD PENDIDIKAN

Pada bab ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka penengah organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat. Tujuan yang dirumuskan tentunya telah diturunkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Setiap tujuan yang dirumuskan, dirumuskan pula sasaran yang hendak dicapai dan indikator tujuan dan sasaran, serta target kinerja sesuai dengan tujuan berdasarkan tahun perencanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Pendidikan

Hal yang utama dan menjadi skala prioritas yang akan dijelaskan dalam tujuan dan sasaran dari misi Disdik Sumatera Barat ini adalah meningkatkan dan memecahkan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan Sumatera Barat. Seperti mengenai akses dan pemerataan layanan pendidikan, kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta persebarannya yang belum merata, mutu dan kualitas pendidikan, daya saing di dunia kerja dan mempunyai sasaran menciptakan manusia yang berpendidikan berkarakter madani. Oleh sebab itu, penjabaran dari tujuan dan sasaran dari misi Disdik Sumatera Barat akan diuraikan sebagai berikut: Meningkatknya akses dan pemerataan pendidikan Sumatera Barat;

- a. Meningkatknya kompetensi dan professionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- b. Meningkatknya mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi;
- c. Meningkatknya efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan; dan
- d. Terimplementasinya pendidikan berkarakter madani

"Terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing", menjadi visi Disdik Sumatera Barat 2016-2021. Manusia sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing merupakan upaya yang harus dicapai agar menghasilkan insan cerdas dan kompetitif. Arah visi tersebut adalah untuk mewujudkan serta meningkatkan *ability* manusia Sumatera Barat yang cerdas dan berkarakter. Cerdas bukan hanya cerdas spiritual keagamaan, tetapi juga cerdas dalam banyak hal, seperti cerdas emosional, cerdas bersosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetik. Visi Disdik Sumatera Barat 2016-2021 merupakan visi yang selaras dengan visi RPJP 2005-2025, visi Pendidikan RenstraKemendikbud 2015-2019 dan Visi RPJMD Sumbar 2016-2021. Oleh sebab itu, untuk mencapai visi diatas, Disdik Sumatera Barat merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan;
- b. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- c. Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi;
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola layanan pendidikan; dan
- e. Mengimplementasikan pendidikan berkarakter madani

Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menjadi suatu keharusan yang dicapai pada tahun 2016-2021. Akses dan pemerataan layanan pendidikan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan misi Disdik Sumatera Barat. Selain itu, meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi merupakan upaya yang terus ditingkatkan agar pemerataan layanan dan akses dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi tata kelola layanan pendidikan yang merata dan dapat diakses dengan mudah. Sehingga implementasi manusia madani itupun dapat terwujud dengan baik pada setiap insan Sumatera Barat yang cerdas.

Tabel 4.1-1 Penyelarasan Tujuan, sasaran dan Indikator serta target kinerja pembangunan pendidikan Sumbar.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan		Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun						
	sasaran		sasaran	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan sumatera	meningkatnya akses dan pemerataan	Peningkatan APM	68.85	71.03	73.27	75.59	77.98			
	barat	pendidikan sumatera barat	Peningkatan APK	86.20	86.58	86.96	87.34	87.72			
			Peningkatan indek integritas UN SMA/SMK	66.57	67.52	68.49	69.47	70.07			
			Meningkatnya angka	100.8	101.7	102.6	103.5	104.4			
			kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	3	2	2	3	4			
			Penurunan angka putus sekolah SMA	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001			
			Penurunan angka tidak melanjut ke SMA	4.86	5.31	5.81	6.36	6.96			
			Peningkatan jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	44.99	48.08	51.38	54.91	58.68			
			Peningkatan	100.4	101.2	102.0	102.7	103.5			
			Kelulusan SMK	9	5	1	8	6			
			Penurunan angka putus sekolah SMK	0.01	0.01	0	0	0.001			
			Peningkatan jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	27.71	28.79	29.92	31.10	32.32			
2.	Peningkatan kompetensi dan professionalisme guru dan tenaga kependidikan	meningkatnya kompetensi dan professionalisme guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	74.02	75.80	77.62	79.48	81.39			
3.	Peningkatan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi	meningkatnya mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan	Meningkatnya jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.07	85.96	86.65	87.75	88.66			
	informasi	literasi teknologi informasi	Meningkatnya jumlah sekolah Luar Biasa yang terakredi- tasi minimal B	61.32	65.82	71.15	75.79	79.74			

4.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan	meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.07	85.96	86.65	87.75	88.66
5.	Pengimplementasian pendidikan berkarakter madani	terimplementasi kannya pendidikan berkarakter madani	Terukurnya Integritas Peserta Didik	68.27	71.92	76.34	79.61	85

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian bab ini dikemukakan strtaegi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang diturunkan dari analisis SWOT dengan menelusuri faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan selama ini, sehingga ditemukan strategi yang tepat menenetukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun ke depan.

Penyusunan rencana pembangunan pendidikan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi Disdik Sumatera Barat ini, Disdik Sumatera Barat mempunyai kekuatan atau keunggulan yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh Disdik Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya lembaga layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi A dan B 60,05%;
- b. Tersedinya tenaga pendidik dengan kualifikasi ≥ S1 96,35%;
- c. UKG 61,63%;
- d. Lulusan SMA/SMK 99,85%;
- e. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih tinggi
- f. Budaya ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*)sebagai jati diri masyarakat Sumatera Barat.

Dibalik kekuatan dan peluang, Disdik Sumatera Barat mempunyai gangguan yang bisa menghambat terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Disdik Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah distribusi guru yang belum merata secara spatial (3T) dan pusat pertumbuhan;
- b. Lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja masih rendah;
- c. Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana pendidikan;
- d. Belum seimbangnya jumlah guru dengan kebutuhan:
- e. Belum optimalnya penerapan IPTEK; dan
- f. Masih belum dicabutnya moratorium pengangkatan GTK.

Disamping adanya gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Disdik Sumatera Barat, ada beberapa tantangan atau ancaman dari luar yang menyulitkan Disdik Sumatera Barat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yakni:

- a. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
- b. Pesatnya peningkatan kualitas pendidikan provinsi tetangga;
- c. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
- d. Disorientasi penggunaan teknologi informasi.

Untuk mengatasi tantangan atau ancaman tersebut, Disdik Sumatera Barat juga mempunyai peluang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, sehingga upaya-upaya yang telah dirumuskan dan direncanakan akan tercapai. Peluang-peluang tersebut adalah:

- a. Inpres No: 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK;
- b. PKG (pendidikan guru keahlian ganda) kompetensi tambahan. Contohnya Guru fisika selain mangajar sesuai dengan bida ilmunya, dia juga dapat mengajar computer;
- c. Pengadaan guru garis depan bagi daerah 3T;

- d. Peluang kerjasama dengan asosiasi dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan; dan
- e. Adanya Lembaga sertifikasi keahlian lulusan SMK. Terbukanya peluang bagi tamatan SMK untuk mendapatkan sertifikasi keahlian.

Langkah pertama adalah merumuskan faktor strategis internal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat . faktor strategi internal yang mendorong kepada peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dapat dilihat dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan. Adapun faktor internal dari kekuatan peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat itu adalah 1). Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang memadai, 2). Sistem manajemen sekolah yang sudah berjalan, 3). Infrastruktur sekolah yang sudah ada, 4). Kesehatan organisasi sekolah. Sedangkan faktor internal yang merupakan kelemahan dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional adalah: 1). Kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai, 2). Kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah (hasil UKG rendah), 3). Lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme, 4). Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah

Pada sisi lain faktor strategis eksternal yang mempengaruhi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat ke depan dari faktor peluang adalah: 1). Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang mendorong kepada sekolah bermutu, 2). Penilaian sekolah berprestasi nasional, 3). Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN, 4). Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional. Sedangkan factor strategis ekternal berupa ancaman terhadap pencapain daya saing pendidikan Sumatera Barat kedepan itu adalah: 1). Mudahnya masuk informasi teknologi ke lingkungan sekolah secara bebas, 2). Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga, 3). Standarisasi sekolah nasional dan internasional, 4). Kecenderungan akan terjadidnya isintegrasi bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-sumber belajar di sekolah.

Berdasarkan kepada faktor strategis internal dan eksternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat diatas, kemudian dapat dirumuskan strategis peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Strategi ini tentunya akan memayungi program dan kegiatan dalam peningkatan daya saing di level regional dalam lima tahun ke depan. Berikut ini akan disajikan penyelarasan strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di lvel regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016-2021.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Visi: "Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter										
madani dan berdaya saing"										
Misi 1: Mewujudkan akses dan pemerataan layanan pendidikan										
Tujuan 1 Sasaran 1 Strategi 1 Arah Kebijakan 1										
Peningkatan akses	Meningkatnya akses	Peningkatan mutu	Peningkatan							
dan pemerataan	dan pemerataan	dan daya saing	ketersediaan							
pendidikan menengah	pendidikan menengah	sekolah menengah	SMA/SMK di							
Sumatera Barat	Sumatera Barat	melalui perbaikan	daerah yang belum							
		infrastruktur sekolah	memiliki satuan							
		menengah dan	pendidikan							

		penyehatan organisasi sekolah menengah untuk mampu berprestasi unggul di level regional	menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP/SMA satu atap; dan meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah
Tujuan 2	Sasaran 2	Strategi 2	Arah Kebijakan 2
Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khusus dan layanan khusus	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan khusus dan layanan khusus	Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan khusus dan layanan khusus melalui perbaikan infrastruktur sekolah dengan layanan khusus dan penyehatan organisasi sekolah dengan layanan khusus untuk mampu berprestasi unggul di level regional	Peningkatan ketersediaan SMA/SMK dengan layanan khusus di daerah yang belum memiliki satuan pendidikan khusus, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP/SMA satu atap; dan meningkatkan ketersediaan SMK dengan layanan khusus yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah
	ompetensi, dan profesi		
Tujuan 1	Sasaran 1	Strategi 1	Arah Kebijakan 1
Peningkatan	Meningkatnya	Peningkatan	Peningkatan
kompetensi dan profesionalisme guru	kompetensi dan professionalism guru	kompetensi guru dan tenaga kependidikan	kompetensi dan profesionalisme
dan tenaga	dan tenaga	sekolah menengah	guru dan tenaga
kependidikan sekolah	kependidikan melalui	melalui sistem	kependidikan
menengah	uji kompetensi guru sekolah menengah	pendidikan dan pelatihan untuk penguasaan ICT	sekolah menengah
		dengan menjalin kerjasama dengan	
			52

		sekolah-sekolah kejuruan dan mitra	
m : 2	C 2	di luar negeri.	A 1 17 1 1 . 2
Tujuan 2	Sasaran 2	Strategi 2	Arah Kebijakan 2
Peningkatan	Meningkatnya	Peningkatan	Peningkatan
kompetensi dan	kompetensi dan	kompetensi guru dan	kompetensi dan
profesionalisme guru	profesionalisme guru	tenaga kependidikan	profesionalisme
dan tenaga	dan tenaga	sekolah khusus dan	guru dan tenaga
kependidikan sekolah	kependidikan melalui	layanan khusus melalui sistem	kependidikan sekolah khusus dan
khusus dan layanan khusus	uji kompetensi guru sekolah khusus dan	pendidikan dan	layanan khsusus
Kiiusus	layanan khusus	pelatihan untuk	layallali kiisusus
	layallali Kilusus	penguasaan ICT	
		dengan menjalin	
		kerjasama dengan	
		sekolah-sekolah	
		kejuruan dan mitra	
		di luar negeri	
	nutu, relevansi, daya sa	ing pendidikan dan lit	erasi teknologi
informasi Tujuan 1	Sasaran 1	Stratogi 1	Arah Kebijakan 1
Peningkatan mutu,	Meningkatnya mutu,	Strategi 1 Peningkatan sistem	Meningkatnya
relevansi, daya saing	relevansi, daya saing	tata kelola sekolah	mutu, relevansi,
pendidikan sekolah	pendidikan menengah	menengah melalui	daya saing
menengah dan literasi	dan literasi teknologi	perbaikan sistem	pendidikan
teknologi informasi	informasi	informasi teknologi	menengah dan
		yang menunjang	literasi teknologi
		proses pembelajaran	informasi
		untuk menyaring	
		informasi dan	
		teknologi yang	
		masuk secara bebas	
		dalam lingkungan	
		sekolah menengah	
Tujuan 2	Sasaran 2	Strategi 2	Arah Kebijakan 2
Peningkatan mutu,	Meningkatnya mutu,	Peningkatan sistem	Meningkatnya
relevansi, daya saing	relevansi, daya saing	tata kelola sekolah	mutu, relevansi,
pendidikan sekolah	pendidikan khusus	khusus dan layanan khusus melalui	daya saing
khusus dan layanan khsusus dan literasi	dan layanan khusus dan literasi teknologi	perbaikan sistem	pendidikan khusus dan layana khsusu
teknologi informasi	informasi	informasi teknologi	dan literasi
teknologi ililoi iliasi	IIIOIIIIasi	yang menunjang	teknologi informasi
		proses pembelajaran	cknologi iiiloi iilasi
		untuk menyaring	
		informasi dan	
		teknologi yang	
		masuk secara bebas	
		dalam lingkungan	
		sekolah khusus dan	
		layanan khusus	

Misi 4: Mewujudkan e	fektifitas dan efisiensi t		
Tujuan 1	Sasaran 1	Strategi 1	Arah Kebijakan 1
Peningkatan efisiensi	Meningkatnya	Peningkatan efisiensi	Meningkatnya
dan efektifitas tata	efisiensi dan	dan efektifitas tata	efisiensi dan
kelola layanan	efektifitas tata kelola	kelola layanan	efektifitas tata
pendidikan menengah	layanan pendidikan	pendidikan melalui	kelola layanan
	menengah	penyehatan	pendidikan
		manajemen	menengah
		organisasi sekolah	
		yang transparan dan	
		akuntabel	
Misi 5: Mewujudkan p	endidikan berkarakter	madani	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengimplementasian	Terimplementasikann	Peningkatan	Penumbuhan dan
pendidikan	ya pendidikan	pendidikan karakter	peningkatan budi
berkarakter madani	berkarakter madani	melalui penyehatan	pekerti melalui
sekolah menengah	sekolah menengah	lingkungan internal	pendidikan
		sekolah menengah	karakter berbasis
		yang menyenangkan	nilai nilai
		dengan	kebangsaan dan
		menanamkan nilai -	budaya lokal
		nilai kebangsaan dan	Minangkabau
		kearifan lokal dalam	
		proses pembelajaran	
		oleh guru dan warga	
		sekolah menengah	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif serta bidang dan bagian yang bertanggung jawab. Untuk lebih lengkapnya ditampilkan dalam tabel excell.

Tabel 6.1. Rencana Program dan kegiatan, Indikator dan kerangka pendanaan

	Sasaran K	asaran Kode				Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun	Tar	rget kinerj	a Progran pendanaa		ingka	Kondisi kinerja	Unit kerja	
Tujuan			Kode Program dan I	Program dan Kegiatan	n Kegiatan Tujuan dan sasaran	Awal Perencanaan 2016	2017	2018	2019	2020	2021	pada akhir Periode	Penang gung Jawab	Lokasi	
T1	S1			eningkatnya mutu ndidikan											
				ningkatan jumlah penduduk ia sekolah yang terlayani	Peningkatan APM		68.85	71.03	73.27	75.59	77.98				
			1.1.2. Pen	ningkatan daya tampung ningkatan kualitas asarana sekolah	Peningkatan APK		86.20	86.58	86.96	87.34	87.72				
			1.2. Pen	ningkatan kualitas proses mbelajaran	Peningkatan Indek Integritas UN SMA/SMK		66.57	67.52	68.49	69.47	70.47				
				ningkatan kompetensi guru n tenaga kependidikan											
			pela	ningkatan kualitas laksanaan evaluasi mbelajaran											
				ningkatan ketersediaan rana pembelajaran											
			1.2.4. Pela	laksanaan pendidikan rkarakter											
				laksanaan pengembangan kat dan prestasi siswa											
			yan	ningkatan jumlah sekolah ng memenuhi standar layakan											
			ma	ningkatan pelayanan anajemen pendidikan											
				nyediaan pembiayaan ndidikan											

T2	S2	2.1.	Program Peningkatan akses, perluasan dan mutu pendidikan SMA	Meningkatnya angka kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	100.8	101.72	102.62	103.53	104.44		
				Penurunan angka putus sekolah SMA	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001		
				Penurunan angka tidak melanjut ke SMA	4.86	5.31	5.81	6.36	6.96		
				Peningkatan jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	44.99	48.08	51.38	54.91	58.68		
		2.2.	Program peningkatan akses, perluasan dan mutu pendidikan SMK	Peningkatan Kelulusan SMK	100.49	101.25	102.01	102.78	103.56		
				Penurunan angka putus sekolah SMK	0.01	0.01	0	0	0.01		
				Peningkatan jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	27.71	28.79	29.92	31.10	32.32		
		2.3.	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	74.02	75.80	77.62	70.48	81.39		
		2.4.	Program Pendidikan Layanan Khusus								
		2.5.	Program manajemen layanan Pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.07	85.96	86.85	87.75	88.66		
				Meningkatnya jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	61.32	65.82	71.15	75.79	79.74		
		2.6.	Program Pendidikan Berkarakter	Terukurnya Integritas Peserta Didik	68.27	71.92	76.34	79.61	85		

RENSTRA 2016-2021(REVISI) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT